

**SKRIPSI**

**OPTIMALISASI ALOKASI DANA DESA DALAM MENINGKATKAN  
PEMBANGUNAN KAMPUNG WARMON KOKODA KABUPATEN  
SORONG PROVINSI PAPUA BARAT DAYA**

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan (S.IP)



**Disusun oleh:**

**Nama : Amin Bodori**

**Nim : 146520120051**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS HUKUM ILMU SOSIAL DAN POLITIK  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH SORONG  
2024**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya kami diberi kemampuan dan kemudahan kepada saya sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Optimalisasi Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Kampung Warmon Kokoda Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat Daya “ laporan skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mengerjakan penelitian pada program strata-1 di jurusan ilmu pemerintahan, Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong.

Dengan kerendahan hati Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Maka itu dalam kesempatan ini saya ingin mengucapkan terimah kasih kepada:

1. Dr. Rustamadji, M.Si selaku Rektor Universitas Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong.
2. Agfajrina Cindra Pamungkas, M.H.I. sebagai Dekan Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Politik.
3. Ibu karmila sinen, M.IP Selaku ketua Ketua program studi ilmu pemerintahan, Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong, dan selaku dosen pembimbing atas bimbingan, saran, dan motivasi yang diberikan.
4. Jusmin,M.Ec.Dev. sebagai pembimbing II yang sudah memberikan arahan,Saran dan perbaikan sehingga skripsi ini menjadi jauh lebih baik.
5. Orang tua, parah saudara-saudara atas doa, bimbingan, serta kasih sayang, yang tercurah selama ini.Rekan-rekan seperjuangan khususnya di jurusan ilmu pemerintahan yang selalu memberikan semangat, dukungan dan kerjasamanya. Saya menyadari skrips ini tidak luput dari berbagai kekurangan. Penulis mengharapakan saran,kritik dan perbaikannya sehingga akhirnya laporan skripsi

ini dapat bermanfaat bagi bidang pendidikan dan penerapan di lapangan serta bisa dikembangkan lagi, lebih lanjut.

Sorong, 24 September 2024

Amin Bodori

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	8
1.3 Tujuan Penelitian .....	8
1.4 Manfaat Penelitian .....	8
<b>BAB II TINJAUAN TEORI.....</b>	<b>10</b>
2.1 Tinjauan Teori.....	10
2.1.1 Optimalisasi.....	10
2.1.2 Alokasi Dana Kampung .....	11
2,1.3 Pembangunan .....	11
2.1.4 Pemerintah Kampung.....	13
2.1.5 Tujuan Alokasi Dana Kampung.....	16
2.1.6 Definisi Konseptual.....	17
2.1.7 Definisi Oprasional .....	21
2.2 Penelitian Terdahulu .....	27
2.3 Kerangka Berfikir.....	41
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>44</b>
3.1 Jenis dan Desain Penelitian.....	44
3.1.1 Jenis Penelitian.....	44
3.1.2 Desain Penelitian.....	44
3.2.3 Tempat dan Waktu Penelitian .....	45
3.3.4 Sumber Data.....	45
3.4.5 Teknik Pengumpulan Data.....	49
3.1.6 Teknik Analisis Data.....	50

<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>52</b>
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	52
4.1.1 Letak dan Kondisi Geografis .....	52
4.2 Hasil Penelitian .....	54
4.2.1 Tahap Perencanaan Pengelolaan Dana Desa.....	55
4.2.2 Tahap Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa.....	57
4.3 Pembahasan.....	59
4.3.1 Optimalisasi Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Kampung Warmon Kokoda.....	59
4.3.2 Pengawasan Badan Permusyawaratan Kampung.....	60
4.3.3 bagaimana kampung warmon kokoda atas pengoptimalisasian    penggunaan dana desa oleh pemerintah kampung warmon kokoda.....	61
 <b>BAB V PENUTUP.....</b>	 <b>63</b>
5.1 Kesimpulan .....	63
5.2 Saran.....	64
 <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	 <b>65</b>
<b>DRAF ( INSTRUMEN PENELITIAN ).....</b>	<b>67</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>69</b>

## **ABSTRACT**

This Village Fund Allocation is included in the Village Fund Allocation transfer group or often abbreviated as ADD, is a balance fund received by districts/cities in the Provincial Regional Expenditure Revenue Budget and district/city Regional Expenditure after deducting the Special Allocation Fund. The purpose of this study is to determine the optimization of village fund allocation (ADD) in increasing village development, the approach used is a descriptive qualitative approach, The research in this study uses qualitative. Qualitative research focuses on naturalistic conditions, where the researcher is the key instrument of qualitative research results that emphasizes more on meaning than generalization, a series of procedures and methods used to analyze and collect data to determine the variables that will be the topic of research. The research design with primary data and secondary data. In this study, the author uses primary data and secondary data. The researcher will analyze the optimization of Village Fund Allocation implemented by the Warmon Village Government related to the use of village funds in the development of Warmon Kokoda Village. The research will interact with data sources and by means of in-depth interviews to find information related to optimizing village fund allocation in improving the development of Warmon Kokoda Village, Sorong Regency, Southwest Papua Province.

Keywords: *Optimization, Village Fund Allocation, Development, Community Welfare.*

## ABSTRAK

Alokasi Dana Desa ini termasuk dalam kelompok transfer Alokasi Dana Desa atau yang sering di singkat ADD, adalah dana perimbangan yang di terima kabupaten/kota Dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah di kurangi Dana Alokasi Khusus. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui optimalisasi alokasi dana desa (ADD) dalam meningkatkan pembangunan kampung, pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif deskriptif, Penelitian dalam kajian ini menggunakan kualitatif. Penelitian kualitatif tertuju pada kondisi naturalistik, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci dari hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna dari pada generalisasi, rangkaian prosedur dan metode yang dipakai untuk menganalisis dan menghimpun data untuk menentukan variabel yang akan menjadi topik penelitian. Desain penelitian dengan data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer data sekunder. Peneliti akan menganalisis pengoptimalisasian Alokasi Dana Kampung yang di terapkan oleh Pemerintah Kampung warmon terkait penggunaan dana kampung dalam pembangunan Kampung Warmon Kokoda. Penelitian akan berinteraksi dengan sumber data dan dengan cara interviu atau wawancara mendalam untuk mencari informasi terkait optimalisasi alokasi dana desa dalam meningkatkan pembangunan Kampung Warmon Kokoda Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat Daya.

**Kata Kunci:** *Optimalisasi, Alokasi Dana Desa, pembangunan, Kesejahteraan Masyarakat.*

## **PERNYATAAN KEASLIAN**

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Sorong, 24 September 2024

Yang Membuat Pernyataan

Amin Bodori

146520120051

LEMBAR PENGESAHAN

OPTIMALISASI ALOKASI DANA DESA DALAM MENINGKATKAN  
PEMBANGUNAN KAMPUNG WARMON KOKODA KABUPATEN  
SORONG PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

NAMA : Amin Bodori

NIM : 146520120051

skripsi ini telah disahkan oleh Dekan Fakultas Hukum Ilmu Sosial Dan Politik  
Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong

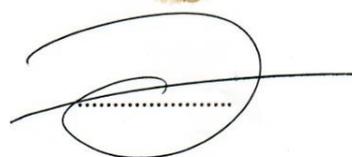
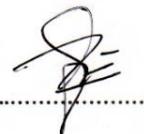
pada 16 November 2024  
Dekan  
  
AGIA RINA CINDRA PAMUNGKAS, M.H.I  
NIDN. 1420089201

Tim Penguji Skripsi

1. Karmila Sinen, M.I.P  
NIDN. 1421068801

2. Yoga Ardiyan, M.I.P  
NIDN. 1421059501

3. Eddy Supardi, M.P.A  
NIDN. 0012066601

  
.....  
*Yoga*  
.....  
  
.....

**LEMBAR PESETUJUAN SKRIPSI**

**OPTIMALISASI ALOKASI DANA DESA DALAM MENINGKATKAN  
PEMBANGUNAN KAMPUNG WARMON KOKODA KABUPATEN SORONG  
PROVINSI PAPUA BARAT DAYA**

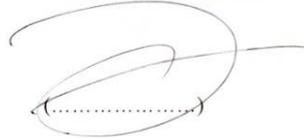
**NAMA : Amin Bodori  
NIM : 146520120051**

Telah di setujui oleh tim pembimbing

Pada 31 Oktober 2024

Pembimbing I

1. Karmila Sinen, S.IP. M.I.P  
NIDN. 1421068801



Pembimbing II

2. Jusmin, M.Ec.Dev.  
NIDN. 1401088801



Mengetahui,  
Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan



Karmila Sinen, S.IP. M.I.P  
NIDN. 1421068801

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Layaknya seorang manusia yang selalu mengalami perkembangan baik fisik ataupun mental secara bertahap, masyarakat sebagai gabungan dari individu individu yang membentuk suatu kelompok juga mengalami perubahan demi perubahan seiring berjalannya waktu. Perkembangan yang terjadi dalam masyarakat merupakan bagian dari perubahan sosial. Perubahan dan perkembangan masyarakat tidak terjadi dengan sendirinya, melainkan terdapat faktor-faktor yang menjadi penyebab akibat dari interaksi dan aktivitas masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat dapat berlangsung secara cepat, terjadi secara tiba-tiba tanpa dikehendaki. Bisa juga berlangsung secara perlahan tanpa disadari oleh masyarakat.

Tahun 1998 Indonesia memasuki babak baru yang disebut dengan era reformasi. Dimana era ini ditandai dengan digulingkannya kepemimpinan Presiden kedua Indonesia kala itu dipimpin oleh Soeharto. Era reformasi mengubah tatanan sistem Pemerintahan dari Sentralistik menuju Desentralistik, dari pemerintahan yang terpusat kemudian diserahkan kepada masing-masing daerah, atau saat ini lebih dikenal dengan Otonomi Daerah. Otonomi Daerah diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tentang Pemerintah Daerah. *Steffy Adelia Tind 2015 "Peranan Pemerintah Desa Dalam Perencanaan Pembangunan"*

Menurut Undang- undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selanjutnya

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Kemudian, desa adalah desa dan desa adat<sup>1</sup> atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan 2 pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia. Sehingga, selain menyerahkan otonomi daerah pada tingkatan Pemerintah Daerah, Kampung sebagai instrument terkecil dalam negara juga berwenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menjadi landasan bagi desa untuk menjalankan roda pemerintahannya. Pasca disahkannya Undang-undang tersebut, pembentukan desa-desa baru di penjuru pelosok Indonesia semakin bertambah pesat.

Menurut data Kementerian Dalam Negeri Per 29 Juni 2016, jumlah desa yang sebelumnya pada tahun 2015 berjumlah 74.093, bertambah sebanyak 661 desa, dan di tahun 2016 jumlah desa di Indonesia mencapai 74.754. Salah satu Desa yang mengalami pembentukan menjadi desa baru adalah Kampung Warmon Kokoda tepatnya di Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya. Istilah penyebutan kampung di Papua adalah desa, dan distrik adalah kecamatan. Kampung Warmon Kokoda merupakan sebuah desa yang dihuni oleh masyarakat asli Papua dengan kelompok yang disebut dengan Suku Kokoda.<sup>2</sup>

Suku Kokoda adalah orang Papua yang berasal dari daerah di Kabupaten Sorong Selatan, tepatnya di Kampung Siwatori, Distrik Kokoda. di Papua, istilah "tuan tanah" mengacu pada kepemilikan wilayah, sehingga masyarakat Suku

---

<sup>1</sup> Praysi Nataly Ratu, Novie R. pioh, Stefanus Sampe 2022 *Optimalisasi Kinerja Bidang Sosial Budaya Dan Pemerintahan Dalam Perencanaan Pembangunan (Studi Di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Minahasa)*

<sup>2</sup> Nafis Nidhomi, 2020 *Perubahan sosial masyarakat warmon kokoda pasca pembentukan desa (Studi Kasus: Desa Warmon Kokoda, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat)*

Kokoda tidak berbeda dari orang Papua lainnya, seperti halnya suku pendatang yang datang dari Jawa. Karena Suku Moi adalah pemilik tanah di wilayah Kabupaten Sorong.

Jauh sebelum terbentuk menjadi Kampung secara definitif masyarakat Warmon Kokoda adalah masyarakat yang nomaden, berpindah-pindah tempat di sekitar wilayah Kabupaten dan Kota Sorong. Pemukiman Masyarakat Kokoda sendiri tersebar di beberapa wilayah di Kabupaten dan Kota Sorong. Di wilayah kabupaten dapat dijumpai di Kampung Sagu, perkampungan Usili, Korwato, Klalin, Kampung Maibo, dan di Kampung Warmon Kokoda. Kemudian di wilayah Kota dapat dijumpai di Kilo meter 10, Viktory Pante, Kilo meter 8, Rufei, serta dahulunya di sekitar Bandara. Masyarakat Kokoda di Kampung Warmon Kokoda masih ada keterikatan yang sangat kuat dengan masyarakat Kokoda di daerah kota yaitu di Rufei, dimana mereka sama-sama berasal dari kampung asal yang sama yaitu Siwatori dan juga dahulunya mereka tinggal bersama di Rufei. Masyarakat Warmon Kokoda adalah masyarakat yang masih menggantungkan hidupnya pada hasil hutan, atau bisa dikatakan hidup pada fase berburu dan meramu atau nelayan.

Warmon Kokoda sebelumnya termasuk dalam wilayah administratif Kelurahan Makbusun, berdekatan dengan komunitas transmigran Jawa dalam satu kelurahan sebelum menjadi Kampung. Dengan dukungan dari Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM), Muhammadiyah Warmon Kokoda kemudian resmi menjadi Kampung yang diakui dan disahkan oleh negara pada akhir 2015.

Dengan terbentuknya Kampung Warmon Kokoda secara definitif, maka pada saat itulah Kampung Warmon Kokoda telah terdaftar sebagai kampung yang berhak menerima Alokasi Dana Desa (ADD) guna meningkatkan Pembangunan Kampung Warmon Kokoda, yang mana Kampung Warmon Kokoda baru terbentuk pada akhir Tahun 2015, dengan terbentuknya Kampung Yang baru maka penduduk yang berada di Kampung Warmon Kokoda tidak banyak dibanding dengan kampung-kampung lainnya.

Setelah berdirinya Kampung Warmon Kokoda, Pemerintah menurunkan Alokasi Dana Desa sesuai jumlah penduduk dan/atau Program-program Kampung

yang telah dimusyawarakan oleh pihak Pemerintah Kampung serta keterlibatan dari masyarakat Kampung Warmon Kokoda dalam memajukan dan meningkatkan pembangunan maupun kesejahteraan masyarakat Kampung Warmon Kokoda.

Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima Kampung Warmon Kokoda berjumlah Seratus Lima Puluh Juta 150.000.000 (seratus lima puluh juta) secara Bertahap, 3 tahap dengan prosentase tiap tahapan, semenjak terbentuknya Kampung Warmon Kokoda pada akhir tahun 2015. Namun seiring berjalannya waktu pihak Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota telah ditambahkan Dana ADD rata-rata pada tahun 2024 mencapai Rp.800 jutaan hingga Rp. 1 milyar. Kucuran itu merupakan jawaban atas kebutuhan masyarakat Kampung sesuai program kerja yang diusulkan Kampung, baik yang telah dilaksanakan hingga selesai maupun yang belum selesai dan/atau sedang dilaksanakan.

Sesuai informasi yang disampaikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (PMK) Kabupaten Sorong, yaitu bapak Maklon Wally mengatakan, jika dibandingkan tahun sebelumnya, memang terjadi peningkatan terhadap besaran ADD untuk Kabupaten Sorong pada tahun ini yaitu pada tahun 2023, dana desa yang dikucurkan terhadap 227 kampung di Kabupaten Sorong hanya Rp. 164 milyar, sedangkan pada tahun 2024, total dana desa sebesar Rp. 176 milyar. Dari 227 kampung, ada salah satu Kampung yang menerima Dana Kampung dengan jumlah fantastis, yakni Kampung Teluk Dore, Distrik Makbon Kabupaten Sorong, kampung yang terletak di jalur pantai utara (Pantura) digadang-gadang akan dikucurkan Dana Kampung senilai hampir Rp. 2 milyar.

Nilai dana desa setiap kampung tidak sama, karena ada beberapa indikator yang mempengaruhi, namun rata-rata ada yang menerima antara Rp. 800 jutaan, ada juga yang menerima Rp. 1 milyar dan yang paling besar itu di Kampung Teluk Dore, totalnya Rp. 1,9 milyar lebih. Ada perbedaan penyaluran dana desa pada tahun ini. Pada tahun sebelumnya penyaluran dilakukan dalam tiga tahap, maka pada tahun ini, mekanisme penyaluran hanya dilakukan dua tahap. Pencairan dana desa dilakukan tiga tahap dengan presentase tiap tahapan, 40 persen, 40 persen, dan 20 persen. Namun pada tahun ini hanya dilakukan dua tahap, yakni 40 persen ditahap pertama dan 60 persen ditahap kedua.

Indikator yang dapat meningkatkan dana ADD Kampung Teluk Dore di banding kampung-kampung lainnya di Kabupaten Sorong yaitu:

- a. Luas wilayah Kampung Teluk Dore yang begitu besar.
- b. Potensi Lokal yang dimiliki oleh Kampung Teluk Dore.

Maka dapat di simpulkan bahwa, terjadinya peningkatan Anggaran ADD yang dikucurkan oleh Pemerintah Kabupaten Sorong kepada Pemerintah Kampung Teluk Dore Distrik Makbon di sebabkan. Luas wilayah Kampung Teluk Dore yang sangat luas, dan memiliki Potensi Lokal. Oleh sebab itu, Pemerintah memberi peningkatan dana ADD terhadap Kampung Teluk Dore Distrik Makbon agar dengan terjadinya peningkatan dana ADD tersebut dapat meningkatkan pembangunan yang lebih merata dan menjadi kampung yang lebih maju dan berkembang di Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat Daya.

Hal tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI, Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa serta Kampung, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2024. Disahkannya Kampung Warmon Kokoda sebagai Kampung definitif tentunya membawa pengaruh besar dalam tatanan hidup masyarakat Kampung Warmon Kokoda, yang dari awalnya hanya komunitas masyarakat adat yang tinggal di suatu wilayah, kemudian ditetapkan secara legal formal menjadi sebuah Kampung. Keberadaan Kepala Kampung sebagai pemimpin masyarakat serta perangkat-perangkat kampung yang membantunya menciptakan sistem kelembagaan baru yang juga ikut hadir dalam struktur sosial masyarakat, dimana pada sebelumnya seorang ‘raja’ menjadi sosok yang dihormati dan dianggap sebagai pemimpin oleh masyarakat di Kampung Warmon Kokoda. Untuk mencapai kemajuan yang berkelanjutan di bidang sosial dan ekonomi sambil mempertahankan persamaan hak dan keadilan bagi masyarakat Indonesia.

Pembangunan nasional mencakup pembangunan infrastruktur sebagai bagian dari upaya untuk membangun manusia Indonesia. Setiap kebijakan pembangunan harus ditujukan untuk pembangunan yang merata di seluruh wilayah Indonesia

dan dibuat untuk kepentingan masyarakat sehingga masyarakat dapat merasakan manfaatnya. Dengan demikian, pada akhirnya, kebijakan tersebut akan berdampak pada perbaikan dan peningkatan taraf hidup masyarakat Indonesia.

Pada saat ini, kedudukan Kampung sebagai objek pembangunan yang dimana tentunya dalam hal pembangunan yang ada di desa harus dilakukan pemerataan, salah satu alasan harus dilakukannya pemerataan pembangunan di Kampung disebabkan bukan hanya karena mayoritas rakyat Indonesia tinggal di kampung, namun kampung bisa menghibahkan sumbangan yang besar di dalam penciptaan stabilitas nasional sehingga titik sentral untuk pembangunan adalah di perkampungan. Untuk mempercepat pembangunan serta meningkatkan keterjangkauan dalam wilayah tertinggal, pemerintah pusat melakukan suatu usaha untuk mengatasi hal tersebut melalui kebijakan Dana Kampung. Dana Desa merupakan dana yang sumbernya berasal dari APBN yang kemudian di transfer melalui APBD Kabupaten/Kota yang nantinya bertujuan untuk mendanai berbagai kegiatan-kegiatan kampung seperti program pembangunan, pemberdayaan serta pemerintahan kampung. Tujuan Dana Desa pada prinsipnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan kampung melalui peningkatan pelayanan publik di kampung, memajukan perekonomian kampung, mengatasi kesenjangan pembangunan antar kampung serta memperkuat kedudukan dan fungsi bagian dari subjek pembangunan. *Annikie Wulan JOM FEB. 2018 "Analisis Pengalokasian Dana Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur Desa Di Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak"*.

Karena sebagian besar wilayah Indonesia berada di perdesaan, kampung sebagai pemerintahan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat menjadi fokus utama dalam pembangunan pemerintahan. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dana pemerintah desa berbeda dari dana pemerintah kabupaten. Penatausahaan keuangan desa ini tidak hanya bertujuan untuk memindahkan otoritas dan dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah; yang lebih penting adalah tujuan untuk meningkatkan pelayanan dan

kesejahteraan masyarakat desa melalui pengelolaan sumber daya keuangan yang lebih efisien dan efektif.

Sehubungan dengan telah dilimpahkannya pengelolaan keuangan desa secara mandiri oleh desa yang selanjutnya disebut dengan Alokasi Dana Desa (ADD). Dalam Pasal 1 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa disebutkan bahwa Alokasi Dana Desa adalah dana yang di alokasikan oleh pemerintah kabupaten/kota untuk kampung yang bersumber dari bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota. Alokasi dana desa sebagian besar digunakan untuk pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah kampung. Dalam perkembangannya, kini desa telah berkembang menjadi berbagai Bentuk-bentuk pemberdayaan sehingga menjadi desa yang mandiri, maju, dan kuat untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. *Desmon, Mahamurah. Markus, Kaunang. Sarah, Sambiran. 2017 "Optimalisasi Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa.*

Untuk mencapai kesejahteraan dan pemerataan kemampuan ekonomi, kampung memiliki wewenang untuk mengatur sendiri kewasannya sesuai dengan kemampuan dan potensi masyarakatnya. Pembangunan juga penting dan memerlukan perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggung jawaban. Untuk mewujudkan masyarakat kampung yang adil dan sejahtera, pembangunan desa harus mencerminkan sikap gotong-royong dan kebersamaan.

Pelaksanaan pembangunan kampung harus sesuai dengan apa yang telah direncanakan dalam proses perencanaan dan masyarakat berhak untuk mengetahui dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan kampung.

Pengelolaan ADD harus dilaksanakan secara terbuka melalui musyawarah kampung dan hasilnya dituangkan dalam Peraturan Desa (Perdes). Ketentuan tersebut menunjukkan komitmen dari pengambilan keputusan bahwa pengelolaan ADD harus mematuhi kaidah good governance yang harus dilaksanakan oleh para pelaku dan masyarakat kampung. *Rika Susanti 1 , Arsa 2 , Ahsan Putra Hafiz 3 , Rohana4 April 2023*

Pengelolaan alokasi dana desa yang telah diberikan oleh pemerintah agar sesuai dengan tujuannya sehingga perlu adanya penerapan fungsi – fungsi manajemen pada setiap proses pengelolaan ADD. Melalui latar belakang ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul’’ Optimalisasi Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Kampung Warmon Kokoda Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat Daya’’. (Studi Kasus: Kampung Warmon Kokoda, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya).

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengoptimalisasian pengelolaan Dana Desa di Kampung Warmon Kokoda?
2. Bagaimana upaya pengawasan yang sudah di lakukan oleh Badan Permusyawaratan Kampung?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dan fokus penelitian yang penulis paparkan diatas, maka.

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih dalam lagi tentang Peran Pemerintah kampung Warmon atas mekanisme dalam Pengoptimalisasian Penggunaan Dana Kampung.
2. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan saran atau masukan yang dapat diterima pada saat melakukan penelitian bahkan setelah penelitian dilakukan.
3. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui hasil-hasil pembangunan di Kampung Warmon Kokoda atas penggunaan dana Alokasi Dana Desa yang telah diterimah

## **1.4 Manfaat Penelitian**

**Adapun manfaat yang diharapkan adalah sebagai berikut:**

1. Kegunaan penelitian ini di harapkan dapat memberikan wawasan dan pikiran bagi perkembangan dan kemajuan pengoptimalisasian dana Kampung Warmon Kokoda Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat Daya.

2. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pikiran yang berharga bagi Pemerintahan Kampung Warmon Kokoda dalam menyikapi penggunaan Dana Kampung.
3. Dapat berguna sebagai bahan pertimbangan, pemikiran dan informasi bagi peneliti lain yang berkaitan dengan pengoptimalisasian alokasi dana kampung.

## **BAB II**

### **TINJAUAN TEORI**

#### **2.1 Kajian Teori**

##### **2.1.1 Optimalisasi**

Menurut Nurrohman,(2017:99-100) Optimalisasi adalah upaya meningkatkan kinerja pada suatu unit kerja ataupun pribadi yang berkaitan dengan kepentingan umum, demi tercapainya kepuasan dan keberhasilan dari penyelenggaraan kegiatan tersebut. Menurut Winardi (2017:363) Optimalisasi adalah ukuran yang menyebabkan tercapainya tujuan sedangkan jika dipandang dari sudut usaha, Optimalisasi adalah usaha memaksimalkan kegiatan sehingga mewujudkan keuntungan yang diinginkan atau dikehendaki. Dari uraian tersebut diketahui bahwa optimalisasi hanya dapat diwujudkan apabila dalam perwujudannya secara efektif dan efisien. Dalam penyelenggaraan organisasi, senantiasa tujuan diarahkan untuk mencapai hasil secara efektif dan efisien agar optimal.

Usaha untuk memaksimalkan kegiatan sehingga menghasilkan hasil yang diinginkan dikenal sebagai optimalisasi. Untuk mendorong pembangunan desa, optimalisasi pemanfaatan Dana Desa adalah cara untuk memaksimalkan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat untuk mencapai hasil dan tujuan yang diinginkan.<sup>1</sup> *Desmon, Mahamurah. Markus, Kaunang. Sarah, Sambiran. 2017 "Optimalisasi Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa.*

Optimalisasi merupakan pencapaian hasil sesuai harapan secara efektif dan efisien. (Rahmawan, 2012) Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa optimalisasi adalah suatu proses, cara dan perbuatan dalam melaksanakan program yang telah direncanakan dengan terencana untuk mencapai tujuan/target sehingga dapat meningkatkan kinerja secara optimal.

### **2.1.2 Alokasi Dana Desa**

Alokasi dana desa (ADD) adalah merupakan dana yang dialokasikan pemerintah kabupaten/kota untuk kampung, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota. Salah satu tujuan dana kampung tersebut ialah untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan kampung dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan meningkatkan pemerataan pendapatan. Perencanaan, pada proses perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) diawali dengan rapat untuk menyusun rencana kegiatan tersebut. Kegiatan tersebut harus melibatkan seluruh masyarakat yang ada dikampung dan lembaga kemasyarakatan melalui forum musyawarah tingkat kampung. <sup>1</sup> *Mateus Alon Dell Vierozh Butarbutar, 2022 "Peranan Masyarakat Dalam Pembangunan Desa"*

Alokasi Dana Desa adalah anggaran yang digunakan oleh pemerintah kampung untuk mendukung masyarakat dan melaksanakan pembangunan yang dikelola langsung oleh masyarakat dan kampung. Dana ini berasal dari pembagian pajak daerah dan saldo keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten.

Musrenbangdesa adalah forum musyawarah yang membahas usulan usulan kegiatan pembangunan kampung yang berpedoman pada prinsip-prinsip perencanaan pembangunan partisipasi masyarakat kampung serta transparansi pemerintah kepada masyarakat.

### **2.1.3 Pembangunan**

Pembangunan merupakan upaya dalam meningkatkan kemampuan masyarakat agar dapat mempengaruhi masa depannya. Pembangunan mengarah kepada perubahan ke arah lebih baik dari taraf hidup sebelumnya. Pembangunan dalam era globalisasi sangat mengandalkan <sup>1</sup> *Maijon Kinaro, 2020 Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Kajhu Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar* sektor ekonomi sebagai ukuran keberhasilan yang dilakukan oleh pemerintah.

Pembangunan harus mempertimbangkan peran masyarakat sebagai pelaku utama dan sebagai pihak yang akan merasakan pembangunan. Jika pembangunan hanya mengutamakan pertumbuhan yang terpusat dan tidak merata, maka pembangunan akan rapuh.

Pembangunan ialah salah satu cara untuk mengikuti perkembangan zaman. Dengan adanya pembangunan berarti ada yang sedang direncanakan. Pembangunan juga sebagai perencanaan untuk perubahan dan pertumbuhan suatu tempat. Menurut siagian pembangunan merupakan sebuah rencana suatu bangsa untuk merubah dan menumbuhkan pemerintahan yang modernitas untuk membina bangsa, Pembangunan itu sendiri memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Indikator pembangunan juga berupa perubahan untuk Negara. Dimana tujuan pembangunan nasional masyarakat Indonesia adalah mensejahterakan rakyat dengan adil dan makmur.

Pembangunan yang hanya mengutamakan pertumbuhan yang terpusat dan tidak merata ditambah lagi dengan tidak diimbangnya kehidupan sosial, politik, ekonomi maka pembangunan akan rapuh. Oleh karenanya, pembangunan harus mengikutsertakan peran masyarakat sebagai pelaku utama serta sebagai pihak yang akan merasakan pembangunan.

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yurisdiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui atau dibentuk dalam sistem pemerintahan nasional berada di Kabupaten / Kota sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945. Landasan pemikiran dalam pengaturan Undang-undang ini mengakui adanya otonomi yang dimiliki oleh desa dengan sebutan lainya dan kepala desa melalui pemerintah desa dapat di berikan penugasan ataupun pendelegasian dari pemerintah daerah untuk melaksanakan pemerintahan daerah tertentu. Sementara itu, terhadap desa diluar desa geonologis yaitu desa yang bersifat admnistaratif seperti desa yang dibentuk karena pemekeran desa ataupun karena transmigrasi

ataupun karena alasan yang lain yang warganya pluralitas, majemuk atau heterogen, maka otonomi desa akan memberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan dari desa itu sendiri.

Kebijakan pembangunan desa dan pengembangan merupakan komponen penting dari kebijakan pembangunan pemerintah kabupaten, kota, provinsi, dan nasional. Ini diatur dalam berbagai dokumen perencanaan jangka panjang, menengah, dan jangka pendek.

#### **2.1.4 Pemerintah Kampung**

Pemerintahan Kampung merupakan ujung tombak yang berhubungan langsung dengan masyarakat secara aktual. Pemerintah Kampung kini tidak lagi menangani urusan kewenangan formal tetapi juga urusan kewenangan informal yang terdiri dari adat, agama, adat dan berbagai hak asal usul dan/atau hak konvensional masyarakat. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan aktivitas masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Kampung adalah kegiatan yang diselenggarakan dalam rangka Pemerintahan dan dilaksanakan oleh Pemerintahan Kelurahan dan Pemerintahan Kampung.

Tujuan yang dimaksud disini adalah peran dari pada pemerintah kampung khususnya kepala kampung dalam proses pencapaian tujuan dan/atau keberhasilan dalam melaksanakan program atau kegiatan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Salah satu sasaran utama dari peran kepala Kampung yakni terciptanya pelayanan yang baik kepada masyarakat. Peran aparatur pemerintah Kampung merupakan upaya yang diharapkan oleh masyarakat untuk menciptakan keadaan yang dapat menyediakan berbagai alternatif yang sah bagi pencapaian aspirasi setiap warga yang paling humanistik (Anwar, 2005). *Steffy Adelia Tind 2015*  
*“Peranan Pemerintah Desa Dalam Perencanaan Pembangunan*

Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, ditegaskan bahwa Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat di dalam

sistem kekuasaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang tersebut dikatakan bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan bantuan menggunakan beberapa panggilan lain dibantu dengan bantuan menggunakan perangkat Desa sebagai perincian dari Pemerintahan Kampung.

Pemerintah Kampung adalah penyelenggara pengelolaan Kampung yang terdiri dari:

- a. Faktor kepemimpinan, khususnya Kepala Kampung;
- b. Unsur Pembantu Kepala Kampung, khususnya Perangkat Kampung yang terdiri dari:
  - 1) Sekretariat Kampung, yaitu kelompok pekerja atau pelayanan yang diketuai dengan bantuan sekretaris kampung;
  - 2) Faktor pemaksaan teknis, khususnya faktor pembantu kepala kampung yang menyelenggarakan urusan teknis di lapangan;
  - 3) Faktor kewilayahan, khususnya pembantu kepala kampung di wilayah kerjanya yang terdiri dari kepala kampung.

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 menyebutkan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan pemerintah kampung merupakan unsur penyelenggara pemerintah yang terdiri atas kepala kampung dan perangkat kampung. Dalam menjalankan tugas-tugasnya, pemerintah kampung dipimpin oleh kepala kampung dibantu oleh sekretaris kampung dan perangkat desa yang terdiri atas kepala kepala urusan, pelaksana urusan, dan kepala dusun. Untuk mengatur dan mengurus urusannya, pemerintah kampung membuat peraturan kampung yang disusun oleh kepala kampung bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). *Sri Sapitri, Rinto Alexandro. September 2021*

Dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, upaya untuk mewujudkan pemerintahan desa yang profesional, efisien, efektif, terbuka, dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat disebut tata kelola pemerintahan desa yang baik. Tata kelola pemerintahan yang baik mencerminkan karakteristik good government dan merupakan peran yang sangat penting dalam perencanaan kegiatan pembangunan, baik di tingkat nasional, daerah, maupun desa.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam pembangunan nasional, desa memegang peranan yang sangat penting, sebab desa merupakan struktur pemerintahan terendah dari sistem pemerintahan Indonesia. Setiap jenis kebijakan pembangunan nasional pasti bermuara pada pembangunan desa sebab pembangunan Indonesia tidak akan ada artinya tanpa membangun desa, dan bisa dikatakan bahwa hari depan Indonesia terletak dan tergantung dari berhasilnya kita membangun desa. Sehingga dengan semangat desentralisasi dalam otonomi daerah ini masyarakat haruslah dilibatkan atau diberdayakan dalam pembangunan desanya. Sebab disadari atau tidak bahwa pembangunan desa telah banyak dilakukan sejak dari dahulu hingga sekarang, tetapi secara umum hasilnya belum memuaskan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan.

#### **2.1.5 Tujuan Alokasi Dana Desa**

Tujuan dari pemberian Alokasi Dana Desa ini adalah Desa adalah untuk memberikan stimulus pembiayaan program pemerintah Serta pemberdayaan masyarakat diantaranya adalah :

- 1) Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan kampung dalam

pelaksanaan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan kewewenangannya.

- 2) Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di kampung dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi kampung.
- 3) Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat kampung.
- 4) Mendorong peningkatan swadaya gotong royong pada masyarakat.

Menurut Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa pasal 72 ayat (2), Pembagian Alokasi Dana Desa menggunakan dasar asas adil dan merata, yaitu :

- a) Asas merata merupakan nilai Alokasi Dana Desa yang dibagikan pada tiap Kampung memiliki nilai yang sama untuk setiap kampung yang disebut dengan Alokasi Dana Desa minimal.
- b) Asas adil merupakan nilai Alokasi Dana Desa yang dibagikan pada

tiap kampung berdasarkan Nilai Bobot kampung yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu atau yang disebut dengan Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP) *Hairil Anwar 2017 Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Desa Nusapati Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah*

Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan hal yang tidak terpisahkan dari Pengelolaan Keuangan Desa dalam APBD, maka, dalam pengelolaan Keuangan Dana Desa (ADD) harus memenuhi Prinsip pengelolaan Alokasi Dana Desa yaitu.

1. Seluruh kegiatan yang didanai oleh Alokasi Dana Desa(ADD) direncanakan, dilaksanakan serta dievaluasi secara terbuka dengan prinsip dari , oleh dan untuk masyarakat
2. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, hukum dan teknis

3. Alokasi Dana Desa (ADD) dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah serta terkendali
4. Jenis kegiatan yang akan dibiayai melalui Alokasi Dana Desa (ADD) sangat terbuka untuk peningkatan sarana pelayanan
5. Alokasi Dana Desa (ADD) harus dicatat dalam anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung dan proses penganggarannya mengikuti mekanisme yang berlaku.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan dari Alokasi Dana Desa adalah untuk meningkatkan perencanaan serta penganggaran pembangunan pemerintahan ditingkat desa serta pemberdayaan masyarakat.

#### **2.1.6 Definisi Konseptual**

Definisi konseptual adalah unsur penelitian yang menjelaskan tentang karakteristik suatu masalah yang hendak diteliti. Berdasarkan landasan teori yang telah dipaparkan di atas, dapat dikemukakan definisi konseptual dari masing masing variabel sebagai berikut:

##### **1. Optimalisasi**

Definisi Konseptual: Optimasi adalah pencarian nilai terbaik dari beberapa fungsi yang diberikan pada suatu situasi. Dalam kasus paling sederhana, optimalisasi adalah memecahkan masalah di mana seseorang berusaha meminimalkan atau memaksimalkan fungsi dengan sistematis, memilih menilai variabel. Dalam hal ini, kata "optimalisasi" mengacu pada elemen-elemen dari beberapa set alternatif yang tersedia.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, optimalisasi berasal dari kata dasar optimal yang artinya terbaik, tertinggi, menjadikan paling baik, menjadikan paling tinggi, paling menguntungkan, pengoptimalan proses, cara, perbuatan mengoptimalkan (menjadikan paling baik, menjadikan paling tinggi dan /sebagainya). *Desmon, Mahamurah. Markus, Kaunang. Sarah, Sambiran.*

## 2017 "Optimalisasi Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa.

Optimalisasi banyak juga di artikan sebagai ukuran di mana semua kebutuhan dapat di penuhi dari kegiatan-kegiatan yang di laksanakan. Optimalisasi menurut para ahli, menurut Poerdwadarminta (Ali, 2014) adalah hasil yang di capai sebagaimana keinginan, jadi optimalisasi merupakan pencapaian hasil sesuai harapan secara efektif dan efisien". Menurut Winardi (Ali, 2014) optimalisasi adalah ukuran yang menyebabkan tercapainya tujuan jika di pandang dari sudut usaha. Optimalisasi adalah usaha memaksimalkan kegiatan sehingga mewujudkan keuntungan yang di inginkan atau di kehendaki. *Steffy Adelia Tind 2015 "Peranan Pemerintah Desa Dalam Perencanaan Pembangunan"*

Berdasarkan dari pengertian teori dan konsep di atas , maka dapat disimpulkan bahwa optimalisasi adalah sebuah proses, melaksanakan program yang telah dilaksanakan untuk mencapai tujuan sehingga dapat meningkatkan dan menghasilkan kinerja yang optimal.

### 2. Alokasi Dana Desa

Definisi Konseptual: Salah satu konsep utama dalam pembangunan Kampung di Indonesia adalah Alokasi Dana Desa (ADD), program pemerintah yang bertujuan untuk membantu Kampung-Kampung di seluruh Indonesia dengan dana.

Melalui (ADD), Pemerintah berupaya memberikan kesempatan kepada Kampung-Kampung untuk mengembangkan potensi local mereka dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kampung. Dalam implementasinya, Alokasi Dana Desa dilakukan melalui berbagai tahapan. Pertama Pemerintah pusat menetapkan besaran dana yang akan dialokasikan ke masing-masing kampung. Besaran dana ini ditentukan berdasarkan kriteria tertentu, seperti jumlah penduduk kampung, tingkat kemiskinan, dan luas wilayah kampung. Setelah itu, Dana tersebut akan dialokasikan kepada pemerintah kampung yang bertanggungjawab untuk mengelola dan

memanfaatkannya sesuai dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan kampung, *Sri Devyana. 2020 "Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa"*

### 3. Peningkatan Pembangunan Kampung.

Definisi Konseptual: Peningkatan pembangunan kampung merujuk pada serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan ekonomi di area pedesaan. Ini termasuk peningkatan infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan, serta pemberdayaan masyarakat setempat. Pembangunan yang berkelanjutan harus mempertimbangkan kebutuhan dan kepentingan masyarakat kampung, sehingga kampung-kampung di Indonesia dapat terus hidup dan berkembang dengan harmoni. Dalam kesimpulan, kampung bukanlah sekadar sebuah tempat tinggal, tetapi juga sebuah identitas dan warisan budaya yang harus dijaga dan dilestarikan. *Siti, Zuliyah. 2010 Strategi Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Menunjang Pembangunan Daerah"*.

### 4. Peran Pemerintah Kampung

Definisi Konseptual: pemerintahan kampung merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga kampung memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Peran aparatur pemerintah desa sangat diharapkan dalam rangka mewujudkan peran pemerintahan sesuai dengan yang diharapkan oleh pemerintah dalam Undang-undang No. 32 tahun 2004, yakni pemerintah desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus daerahnya masing-masing demi kesejahteraan rakyat yang berimbas kepada terwujudnya pembangunan nasional. Dalam lingkungan pemerintah kampung, kepala kampung dan seluruh perangkat kampung sebagai pelaksana tugas pemerintah di kampung yang diharapkan dapat melaksanakan tugas pemerintah kampung dengan baik demi terciptanya kesejahteraan dan pembangunan rakyat di kampung. *Steffy Adelia Tind 2015 "Peranan Pemerintah Desa Dalam Perencanaan Pembangunan"*

## 5. Peran Masyarakat

Definisi Konseptual: Peran merupakan bagian dari peraturan dan/atau norma yang membimbing seseorang dalam masyarakat. Peran merupakan suatu hal yang seharusnya dilakukan individu dalam masyarakat. Peran merupakan perilaku individu yang berperan penting dalam struktur sosial masyarakat. Peran masyarakat merujuk pada fungsi atau tugas yang dilakukan oleh anggota masyarakat dalam struktur sosial. Ini bisa mencakup berbagai aspek seperti pendidikan, ekonomi, politik, dan kebudayaan, di mana setiap individu berkontribusi sesuai dengan kapasitas dan posisinya dalam masyarakat.<sup>3</sup>

### 2.1.7 Definisi Oprasional

**Tabel: 1 Definisi Oprasional**

No	Variable	Indikator	Pertanyaan
1	Opimalisasi	1.Indikator: Tujuan bisa berbentuk maksimasi atau minimisasi. Bentuk maksimasi digunakan jika tujuan pengoptimalan berhubungan dengan keuntungan, penerimaan dan sejenisnya. Bentuk minimisasi akan digunakan jika tujuan pengoptimalan berhubungan dengan biaya, waktu dan	1. tujuan apa saja yang telah pemerintah kampung terapkan atau laksanakan hingga terbilang baik atau optimal. 2. proses program yang dilaksanakan 3. pengaturan dalam mengatur pengoptimalan yang baik. 4. perkembangan

<sup>3</sup> "Mateus Alon Dell Vierozh Butarbutar, 2022 "Peranan Masyarakat Dalam Pembangunan Desa"

		<p>sejenisnya.</p> <p>2. Indikator: Keputusan Pengambilan keputusan dihadapkan pada beberapa pilihan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Hal ini dilakukan untuk mencapai tujuan awal sehingga menghasilkan keputusan yang maksimal.</p>	<p>pengambilan keputusan dalam perkembangan pembangunan kampung.</p> <p>5. apa saja yang telah dilakukan pemerintah kampung dalam pengoptimalan pembangunan kampung.</p>
2	Alokasi Dana Desa	<p>1. Indikator: Transparan, yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa.</p> <p>2. Indikator: Akuntabel, yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam</p>	<p>1. sudah sampai mana keterbukaan pemerintah kampung terkait alokasi dana desa</p> <p>2. pertanggungjawaban apa saja yang telah dilakukan dalam meningkatkan pembangunan kampung.</p> <p>3. apa selama masyarakat selalu ikut serta dalam pelaksanaan program kampung</p> <p>4. apakah</p>

		<p>rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan</p> <p>3. Indikator: Parsipatif, yaitu penyelenggaraan pemerintah desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa.</p> <p>4. Indikator: Tertib dan disiplin anggaran, yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.</p>	<p>pemerintah kampung selaluh disiplin sesuai dengan peraturan yang telah di terapkan.</p> <p>5.apakah pengelolaan dana ADD telah berjalan sesuai dengan harapan masyarakat.</p>
<b>3</b>	Peningkatan Pembangunan Kampung	<p>1. Indikator. Indeks Ketahanan Ekonomi: mengukur kemampuan ekonomi kampung.</p> <p>2. Indikator. Indeks Ketahanan Lingkungan: menilai pengelolaan dan keberlanjutan lingkungan.</p> <p>3. Indikator: Indeks Ketahanan Sosial: mengukur aspek sosial dan kebudayaan.</p>	<p>1. peningkatan kualitas ekonomim yang berjalan sesuai tingkat keperluan masyarakat</p> <p>2.ekonomi sangatlah penting dalam kesejahteraan masyarakat.</p> <p>3. Pengelolaan dana kampung juga sangatlah penting dalam pemeliharaan</p>

		.	<p>lingkungan.</p> <p>4. jumlah dan seni aktivitas seni budaya yang diinisiasi oleh masyarakat.</p> <p>5. tingkat sosial partisipasi dalam peningkatan kegiatan seni budaya dan kontribusi aktivitas tersebut terhadap pelestarian budaya.</p>
<b>4</b>	Peran Pemerintah Kampung	<p>1. Indikator: Fungsi instruktif. Fungsi ini bersifat komunikasi satu arah. Pemerintah sebagai komunikator merupakan pihak yang menentukan apa, bagaimana, bilamana, dan dimana pemerintahan itu dikerjakan agar keputusan dapat dilaksanakan secara efektif.</p> <p>2. Indikator: Fungsi konsultatif. Fungsi ini digunakan sebagai</p>	<p>1. pemerintah sebagai komunikator yang berperang penting mengambil keputusan.</p> <p>2. bagaimana cara yang harus diambil pemerintah agar peningkatan pembangunan kampung</p> <p>3. bilamana pemerintah tidak menjalankan</p>

		<p>komunikasi dua arah. Hal tersebut digunakan sebagai usaha untuk menetapkan keputusan yang memerlukan bahan pertimbangan dan mungkin perlu konsultasi dengan masyarakat-masyarakat yang dipimpinnya.</p> <p>3. Indikator: Fungsi partisipasi Dalam menjalankan fungsi ini pemerintah desa berusaha mengaktifkan masyarakatnya, baik dalam keikutsertaan mengambil keputusan maupun dalam melaksanakannya.</p> <p>Partisipasi tidak berarti bebas berbuat semaunya, tetapi dilakukan secara terkendali dan terarah berupa kerjasama dengan tidak mencampuri dan mengambil tugas pokok orang lain.</p>	<p>komunikator dengan baik maka perlunya perbaikan agar berjalan sesuai harapan.</p> <p>4. pemerintah mempunyai peran penting dalam pengembangan pembangunan kampung agar berjalan dengan efektif dan efisien.</p> <p>5. perlu tingkat kerja sama antar pemerintah dan masyarakat agar dapat saling menerima dalam pembangunan dan pelaksanaan program kampung.</p>
5	Peran	Peran masyarakat merujuk	Menurut Sondang P. Siagian (2001:4)

	Masyarakat	<p>pada fungsi atau tugas yang dilakukan oleh anggota masyarakat dalam struktur sosial. Ini bisa mencakup berbagai aspek seperti Pembangunan, Pendidikan, ekonomi, politik, dan kebudayaan, di mana setiap individu berkontribusi sesuai dengan kapasitas dan posisinya dalam masyarakat.</p>	<p>pembangunan adalah suatu rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu Negara bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualitas pendidikan.</li> <li>2. tingginya biaya pendanaan terhadap pembangunan.</li> <li>3. perlunya pendanaan terhadap peningkatan ekonomi</li> <li>4. peningkatan kebudayaan agar dapat melestarikan budaya.</li> <li>5. perlunya membangun kerja sama dan keterbukaan antar pemerintah kampung dan</li> </ol>
--	------------	---	---

			masyarakat dalam membentuk atau merancang program kampung hingga pelaksanaannya agar semua pihak merasa kepuasan dalam perkembangan dan kemajuan serta kesejahteraan kampung.
--	--	--	---

### 2.1.8 Penelitian Terdahulu

**Tabel: 2 Penelitian Terdahulu**

<b>Peneliti Terdahulu</b>					
<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Tahun</b>	<b>Judul</b>	<b>Hasil</b>	<b>Kelebihan/Kekurangan</b>
1	Sri Sapitri, Rinto Alexanjdro	Tahun 2021	Pengelolaan alokasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat,	Pemberdayaan masyarakat diharapkan mampu menekankan pada 3 (tiga) komponen penting yaitu pemberdayaan lingkungan, pemberdayaan ekonomi, dan pemberdayaan	Kelebihan. mendukung pelaksanaan kegiatan alokasi dana desa yaitu adanya peraturan perundang-undangan yang jelas sehingga tim pelaksana dapat melakukan tugasnya dengan baik. Kekurangan. Faktor penghambat dalam pelaksanaan kegiatan alokasi dana desa yaitu

				<p>manusia. Pemberdayaan lingkungan dialokasikan untuk pembangunan sarana/prasarana fisik yang dapat menunjang mobilitas masyarakat desa</p>	<p>budaya paternalistik yang masih melekat pada masyarakat sehingga mereka cenderung bersikap acuh dan memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada kepala desa. Hal tersebut menyebabkan tidak semua masyarakat tahu tentang adanya program pengelolaan alokasi dana desa tersebut dan juga mengakibatkan rendahnya pengawasan dari masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.</p>
2	<p>Saodatul Qhamariyah, Erni Zuhriyati, S.S., S.IP.,MA</p>	<p>Tahun 2016</p>	<p>Persepsi masyarakat terhadap optimalisasi alokasi dana desa di kecamatan seyegan kabupaten sleman</p>	<p>masyarakat dalam menerima, memahami serta mengevaluasi adanya anggaran alokasi desa serta program yang telah direncanakan memperoleh nilai indeks</p>	<p>Kelebihan. masyarakat di Kecamatan Seyegan sudah banyak yang menerima anggaran alokasi dana desa baik itu secara langsung mereka dapatkan ataupun secara tidak langsung. Banyak dari mereka juga sudah mengerti maksud dan tujuan dari adanya</p>

				<p>sebesar 3,49 dengan kategori baik. Artinya masyarakat di Kecamatan Seyegan sudah banyak yang menerima anggaran alokasi dana desa baik itu secara langsung mereka dapatkan ataupun secara tidak langsung.</p>	<p>alokasi dana desa ini dan mereka juga ikut andil dalam melakukan evaluasi terhadap program-program yang telah dilakukan untuk perbaikan di tahun-tahun selanjutnya. Kekurangan . Pemerintah perlu mengadakan sosialisasi terkait keuangan desa dan penggunaannya. Adanya pemahaman dalam hal alokasi dana desa masih perlu ditingkatkan lagi karena masih ada beberapa kelompok masyarakat yang kurang memahami fungsi dari adanya alokasi dana desa. hal ini agar masyarakat seluruhnya juga bisa ikut berpartisipasi dalam mengelola alokasi dana desa yang telah di anggarakan oleh pemerintah setiap tahunnya.</p>
--	--	--	--	---	---

3	Bonefasius Bao	Desember 2019	Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana kampung di kabupaten keerom	Pelaksanaan indikator pertama dapat dilihat ada sebagian kampung yang sudah melaksanakan pengelolaan Alokasi Dana Desa sesuai dengan peraturan yang berlaku di Kabupaten Keerom Sementara kampung yang lain seperti Kampung Skanto, Kampung Suskun, Kampung Ampas, dan Kampung Kalifam belum bisa melaksanakan dengan baik.	Kelebihan. Pemerintah kabupaten saat ini memang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk lebih banyak berperan aktif dalam pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi serta paska kegiatan. Hal itu dilakukan semata-mata hanya untuk melaksanakan konsep dasar tingkat partisipasi melalui pemberdayaan masyarakat. Kekurangan. ada beberapa kampung yang sudah bisa melaksanakan dengan baik Sementara masih ada juga kampung- kampung yang tidak melaksanakan dengan baik, bahkan cenderung menyalahgunakan untuk kepentingan pribadi seperti yang terjadi di Kampung Suskun,
---	-------------------	------------------	---	--	--

					Kampung Ampas, dan Kampung Kalifam. Bahkan di Kampung Ampas, terjadi penyerangan terhadap rumah Kepala Kampung disebabkan warga yang tidak puas atas kepemimpinan dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Kepala Kampung selama ini.
4	Shendik Widiantoro	September 2020	Optimalisasi alokasi dana desa pada pembangunan infrastruktur sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa sumberdadap	pada proses perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) diawali dengan rapat untuk menyusun rencana kegiatan tersebut. Kegiatan tersebut harus melibatkan seluruh masyarakat yang ada didesa dan lembaga kemasyarakatan melalui forum	Kelebihan. Pemerintah desa sumberdadap melakukan pembangunan sesuai apa yang telah direncanakan dahulu dan Jumlah anggaran alokasi dana desa dalam bidang pembangunan tahun 2019 yaitu biaya Rp. 846.439.000 dan realisasinya Rp. 858.472.000, dari anggaran tersebut desa melakukan pembangunan rabat beton beberapa daerah sepanjang 925 meter, 1

				<p>musyawarah tingkat desa. Musrenbangdesa adalah forum musyawarah yang membahas usulanusulan kegiatan pembangunan desa 117 Jurnal Meta Yuridis Vol. 3 No (2) September 2020 yang berpedoman pada prinsip-prinsip perencanaan pembangunan partisipasi masyarakat desa serta transparansi pemerintah kepada masyarakat.</p>	<p>unit sarana olahraga, dan 4 unit posyandu dan 1 gedung paud. Kekurang. cuaca menjadi hambatan pembangunan pelaksanaan pengerjaan pembangunan infrastruktur di desa sumberdadap. Pada saat pengerjaan hujan deras kerap mengguyur daerah itu.</p>
--	--	--	--	--	---

5	Annike Wulan	(Januari – Juni 2018)	Analisis pengalokasian dana desa terhadap pembangunan infrastruktur desa di kecamatan kota gasib kabupaten siak	Salah satu faktor yang sangat penting dan dapat menunjang pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat yaitu dengan adanya pembangunan infrastruktur yang baik, infrastruktur yang lengkap dan memadai sehingga nantinya dapat memobilisasi kegiatan ekonomi maupun kegiatan sosial masyarakat	Kelebihan. Kekurangan. Berdasarkan prariset yang telah peneliti lakukan di kecamatan Koto Gasib kabupaten Siak, bahwa masih terdapat banyak infrastruktur desa yang masih tertinggal, salah satunya terlihat dari infrastruktur jalan desa yang masih berupa kerikil dan semenisasi. Setelah pemerintah pusat meluncurkan program dana desa yang bertujuan untuk meningkatkan pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat
6	Farida Farida , Mery Wanielisa ,Nursina ,Ruwaida , Nur Wahyuni	Bulan Maret 2021	Optimalisasi Pemanfaatan Dana Desa untuk Mewujudkan Desa Mandiri	pemerintahan daerah tertinggal dan transmigrasi. Terkait dengan upaya mewujudkan pembangunan yang merata melalui implementasi nawacita ke-3 yaitu	Kelebihan.meberikan penyuluhan dan memotivasi masyarakat untuk mencapai tujuan pembangunan desa mandiri melalui pemanfaatan dana desa yang lebih baik yang membutuhkan

				<p>membangun berawal dari desa-desa pinggiran sebagai kerangka Negara kesatuan. Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa dan kawasan pedesaan harus berkualitas. Fokus pembangunan desa dalam rangka meningkatkan produktifitas masyarakat desa,</p>	<p>partisipasi aktif dan masukan kebijakan strategis dari perguruan tinggi dan masyarakat luas.</p> <p>Kekurangan.</p> <p>Permasalahan yang dihadapi oleh desa desa dalam memanfaatkan dana desa belum sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas desa tanpa melanggar aturan.</p> <p>Pemanfaatan dana desa dan pengelolaan agar produktif dan menciptakan pendapatan desa.</p> <p>Perangkat desa ingin mendapatkan penyuluhan dan informasi informasi bagaimana pembentukan BUMDes dan usaha usaha kreatif masyarakat yang bisa dikembangkan.</p>
7	Sri Sapitri .Rinto Alexandro	September 2021	Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan	dengan alokasi dana desa. Selanjutnya, anggaran alokasi dana desa tersebut	Kelebihan. Alokasi dana desa yang diterima digunakan untuk biaya

			<p>Masyarakat akan digunakan sebagai penunjang kegiatan otonomi desa agar dapat maksimal dalam memberikan pelayanan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat ditingkat pedesaan.</p>	<p>penyelenggaraan pemerintah yang diserahkan pada masing-masing-masing pos dan untuk biaya pemberdayaan masyarakat diserahkan kepada tim pelaksana tingkat desa yang nantinya akan dipertanggungjawabkan kepada kepala desa.</p> <p>Kekurangan.dalam pelaksanaan kegiatan alokasi dana desa yaitu budaya paternalistik yang masih melekat pada masyarakat sehingga mereka cenderung bersikap acuh dan memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada kepala desa. Hal tersebut menyebabkan tidak semua masyarakat tahu tentang adanya program pengelolaan</p>
--	--	--	---	--

					alokasi dana desa tersebut dan juga mengakibatkan rendahnya pengawasan dari masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.
8	Khidir Ali, Agung Saputra	Oktober 2020	Tata Kelola Pemerintahan Desa Terhadap Peningkatan Pelayanan Publik Didesa Pematang Johar	Tata kelola pemerintahan desa yang dilaksanakan adalah sebagai upaya dalam mengimplementasikan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Melalui upaya ini diharapkan dapat mewujudkan good goverment untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.	Kelebihan. Keberhasilan kinerja pemerintahan desa di Desa Pematang Johar dalam meningkatkan pelayanan di semua sektor, dapat dilihat dari tata kelola yang efektif dan efisien sehingga masyarakat dapat dengan mudah dalam mendapatkan segala kemudahan dan manfaat dari setiap program dan kebijakan yang dijalankan di lingkungan masyarakat. Kekurangan. sumber daya manusianya. Kenyataan ini juga sesuai dengan penelitian

					yang dilakukan oleh Mouw (2013), yang mengemukakan bahwa pelayanan publik merupakan bentuk intervensi pemerintah terhadap masyarakat dalam upaya pemenuhan kebutuhan, tetapi sampai saat ini intervensi tersebut belum dirasakan sepenuhnya oleh masyarakat, sehingga masih banyaknya keluhan atas rendahnya kualitas pelayanan publik.
9	Aram Palilu	Juni 2022	Analisis partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa dikampung iwin distrik fef kabupaten sorong	Pengelolaan Dana Desa (DD) kampung Iwin sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 mencapai 3 miliar 886 juta, dengan kucuran tahapan anggaran per tahun sebagai berikut : tahun 2015 mencapai 380 juta, tahun 2016 mencapai 560 juta, tahun 2017	Kelebihan. Adapun faktor yang mendukung dari keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan adalah adanya pertemuan/rembuk kampung dalam setiap program pengelolaan dana desa (kampung) yang diadakan oleh Aparat Kampung Iwin. Kekurangan.

				<p>mencapai 680 juta, tahun 2018 mencapai 760 juta, tahun 2019 mencapai 780 juta dan tahun 2020 mencapai 756 juta dan tahun 2020 mencapai 792 juta. (sumber : APBK Fef).</p>	<p>Permasalahannya, cukup banyak desa yang kesulitan mengenai keuangan desa, karena itu Pemerintah mengambil inisiatif untuk mengatasi menggelontorkan bantuan agar fungsi pemerintahan Desa dapat berjalan dalam rangka memberdayakan desa secara komprehensif dan terintegrasi.</p>
10	Siti Zuliyah	2 Agustus 2010	Strategi pemberdayaan masyarakat desa dalam menunjang pembangunan daerah	<p>Berbagai upaya pemberdayaan yang dilakukan pada masyarakat desa harus ditujukan untuk membentuk kemandirian. Bantuan ekonomis saja tanpa didukung kemampuan maupun kemauan untuk maju akan kurang bermanfaat. Setelah bantuan tersebut habis kegiatan</p>	<p>Kelebihan. Ciri khas kehidupan desa adalah kehidupan komunalnya yang ditandai dengan masih kuatnya ikatan kebersamaan dalam hubungan antar individu dalam masyarakat. Kuatnya ikatan tersebut tercermin dalam berbagai sikap dan perilaku gotong royong, tolong menolong dan saling bekerjasama dalam mengerjakan</p>

				<p>pembangunan akan berhenti. Masyarakat yang mandiri memiliki kemampuan tidak saja untuk menikmati namun juga melestarikan dan secara terus menerus mengembangkan hasil pembangunan sehingga akan tercapai pembangunan yang berkelanjutan.</p>	<p>suatu urusan. Budaya tradisional yang masih terus hidup dalam kehidupan masyarakat desa yang sangat kental dengan nuansa kebersamaan tersebut merupakan unsur pendukung keberhasilan pembangunan di desa. Kekurangan. Keterlibatan harus dimulai sejak awal yaitu pada saat penyusunan rencana kegiatan. Sebagai contoh masyarakat diberi kepercayaan untuk membuat rencana kegiatannya. Apabila kegiatan ditujukan pada sekelompok masyarakat dengan kriteria tertentu, maka penunjukan dilakukan oleh masyarakat sendiri secara musyawarah.</p>
--	--	--	--	---	--

Dari Hasil Penelitian Terdahulu terdapat perbedaan yaitu berupa kelebihan dan kekurangannya sebagai tersebut:

**1. Kelebihan.**

Kelebihan dari hasil penelitian terdahulu, Pemerintah kabupaten saat ini memang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk lebih banyak berperan aktif dalam pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi serta paska kegiatan.

mendukung pelaksanaan kegiatan alokasi dana desa yaitu adanya peraturan perundang-undangan yang jelas sehingga tim pelaksana dapat melakukan tugasnya dengan baik.

## **2. Kekurangan.**

Kekurangan dari hasil penelitian terdahulu yaitu, masih ada beberapa kampung yang sudah bisa melaksanakan dengan baik, sementara masih ada juga Kampung-Kampung yang tidak melaksanakan dengan baik, bahkan cenderung menyalahgunakan untuk kepentingan pribadi.

Karena terdapat banyak penyalagunaan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan kampung maka dari hasil atau survei di lapangan baik dari pihak Pemerintah Daerah maupun Pusat, ditegaskan melalui Undang-Undang agar Pemerintah Kampung atau lebih jelasnya kepala kampung dan para staf kampung tidak melakukan penyalahgunaan Dana Kampung sehingga dapat meningkatkan pembangunan kampung sesuai harapan Pemerintah Pusat, Daerah maupun masyarakat.

Uraian penelitian terdahulu dan penelitian ini yaitu, penelitian terdahulu terdapat banyak penyalagunaan alokasi dana desa oleh pemerintah kampung dalam hal ini, kurangnya Peningkatan pembangunan kampung maupun kesejahteraan masyarakat kampung kurang baik. Maka dari itu, penelitian ini berharap terhadap pemerintah kampung terlebih khusus kampung yang peneliti sedang melakukan penelitian tersebut, yaitu kampung warmon kokoda agar tidak terjadi hal yang serupa, agar peningkatan pembangunan kampung maupun sosial di kampung warmon kokoda berjalan efektif dan efisien,

Penelitian ini juga akan mengkaji lebih dalam lagi terkait pengelolaan dana ADD Kampung Wawmon kokoda, dalam meningkatkan pembangunan kampung warmon kokoda melalui dana ADD yang telah di kucurkan oleh pemerintah pusat pemerintah kabupaten/kota beserta bukti-bukti peningkatan

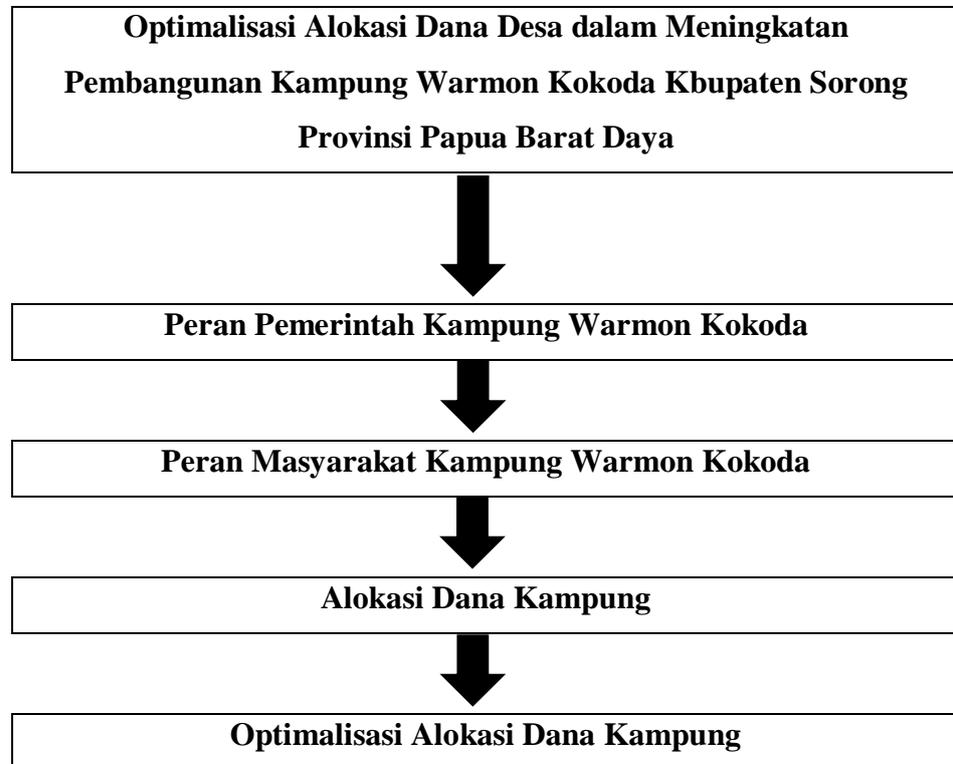
pembangunan kampung warmon kokoda melalui dana ADD yang telah diturunkan oleh pemerintah pusat melalui pemerintah kota/kabupaten dan ditindak lanjuti ke tiap-tiap kampung.

### **2.1.9 Kerangka Berpikir**

Tinjauan kepustakaan, yang sering disebut sebagai "kerangka berfikir", menunjukkan hubungan antara fakta dan teori yang digambarkan dalam bagan dan narasi. Kerangka berfikir juga dapat menggunakan keduanya. Kerangka berfikir memberikan penjelasan tentang masalah yang diteliti, solusinya, dan hasilnya. Dengan demikian, kerangka berfikir berfungsi sebagai alur kerja (prosedur) peneliti untuk menyelesaikan penelitian dengan baik.

Dilakukannya penelitian ini, sehingga dengan adanya alokasi dana desa ini, dapat membantu masyarakat dalam membangun infrastruktur kampung maupun kesejahteraan masyarakat. Kerangka Pemikiran di Gambarkan Sebagai Berikut:

**Tabel: 3 Kerangka Berfikir**



Dalam upaya meningkatkan pembangunan kampung warmon kokoda kabupaten sorong provinsi papua barat daya, Peran serta pemerintah kampung warmon dan masyarakat setempat menjadi kunci utaman dalam meningkatkan pembangunan kampung:

Peran pemerintah kampung Warmon kokoda, Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang utuh maka dibutuhkan berbagai upaya yang serius, salah satunya dengan menemukan formula paradigma pembangunan yang tepat. Berbagai perubahan-perubahan paradigma pun terjadi. Dari paradigma Production Centered Development yang lebih menekankan adanya perubahan-perubahan fisik dan pencapaian kebutuhan dasar tanpa memperdulikan apakah pencapaian tersebut sesuai dengan keinginan masyarakat atau tidak, hingga paradigma pembangunan yang berbasis masyarakat (People Oriented Development) yang menuntut adanya kerjasama dan keseimbangan peran yang baik antara pemerintah, masyarakat dan

swasta.<sup>1</sup> *Khidir Ali, Agung Saputra. 2020. "Tata Kelola Pemerintahan Desa Terhadap Peningkatan Pelayanan Publik Didesa Pematang Johar"*

Dana Desa adalah dana untuk membangun kampung dalam APBN, yang disalurkan melalui APBD. Merupakan salah satu bentuk pemasukan kampung. Terkait dana kampung, jumlah Alokasi, tujuan, dan prioritas dari dana tersebut diatur dalam sejumlah peraturan perundang-undangan dalam menjalankan pemerintahan disuatu kampung, pemerintah kampung tentu memerlukan sejumlah dana. Berdasarkan Pasal 72 UU 6/2014 jo. Perpu 1/2020, desa memiliki beberapa sumber pendapatan. Jika dirinci, pendapatnya berasal dari pendapat asli, alokasi APBN, bagian hasil pajak retribusi daerah, bantuan keuangan dari APBD provinsi dan APBD kota/kabupaten, hibah dan sumbangan dari pihak ketiga, serta dana desa sebagai informasi tambahan, pendapatan yang didapat desa atas berbagai hal, seperti hasil usaha, hasil asset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lainnya.<sup>1</sup> *Sri Sapitri, Rinto Alexandro. September 2021 "Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat"*

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis dan Desain Penelitian**

##### **3.1.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang dialami, (sebagai lawanya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna pada generalisasi Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang dialami, (sebagai lawanya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna pada generalisasi (sugiyono 2019).<sup>1</sup> *Desmon, Mahamurah. Markus, Kaunang. Sarah, Sambiran. 2017 "Optimalisasi Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa.*

Peneliti akan menganalisis pengoptimalisasian alokasi dana kampung yang di terapkan oleh pemerintah kampung warmon yang menjadi salah satu permasalahan terkait penggunaan dana kampung dalam pembangunan kampung warmon. Peneliti akan berinteraksi dengan sumber data dan dengan cara interview wawancara mendalam untuk mencari informasi terkait Optimalisasi alokasi dana desa dalam meningkatkan pembangunan kampung warmon kokoda.

##### **3.1.2 Desain penelitian**

Desain penelitian adalah rangkaian prosedur dan metode yang dipakai untuk menganalisis dan menghimpun data untuk menentukan variable yang akan menjadi topik penelitian. Desain penelitian dengan data

primer/sekunder. Dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer /dan sekunder.

### **3.1.3 Tempat dan Waktu Penelitian**

Tempat dan waktu penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran dan informasi Yang lebih jelas, lengkap, serta memungkinkan dan mudah bagi peneliti untuk melakukan Penelitian observasi. Oleh karena itu, maka penulis menetapkan lokasi penelitian adalah Tempat dimana penelitian akan dilakukan yaitu di Kampung Warmon Kokoda Kabupaten Sorong provinsi papua barat daya, Selama 2 bulan dihitung mulai Bulan April-Juni 2024.

### **3.1.4 Sumber Data**

Sumber data adalah subjek dari mana data tersebut dapat diperoleh dan memiliki informasi Kejelasan tentang bagaimana mengambil data tersebut dan bagaimana data tersebut diolah.

Sumber data dibagi menjadi dua yaitu :

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara, jejak pendapat dari individu atau kelompok ( orang ) maupun hasil observasi dari suatu obyek, kejadian atau hasil pengujian ( benda ). Dalam hal ini yang di wawancarai ialah kepala kampung warmon kokoda, masyarakat warmon dan pihak badan permusyawaratan kampung.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara langsung.

**Tabel: 4 Informan Penelitian**

<b>No</b>	<b>Informen</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Keterangan</b>
1	Kepala Kampung	1. orang	<p>Warmon Kokoda telah mengalami perubahan pada beberapa dimensi masyarakatnya.</p> <p>Meskipun tidak secara signifikan, namun perubahan tersebut jika berlangsung terus menerus bukan tidak mungkin adanya inklusi sosial pada masyarakat Kampung Warmon Kokoda. Perubahan pada masyarakat Kampung Warmon Kokoda merupakan bentuk perubahan kecil yang terjadi secara perlahan atau bisa dikatakan lambat.</p>
2	Ketua BPK	1 orang	<p>Masyarakat kampung warmon kokoda selalu dilibatkan pada musyawara kampung, karena dengan adanya keterlibatan masyarakat, maka apabila terjadi kendala maupun masalah dalam pelaksanaan</p>

			<p>program-program kampung masyarakat akan memahami dan memaklumi akan kendala atau masalah yang terjadi dikampung.</p>
3	Masyarakat	3 orang	<p>Proses pemerataan dana kampung yang dilakukan oleh pihak kampung memang berjalan dengan baik, contohnya saat pembangunan jalan selalu berjalan sesuai harapan, namun pembangunan jalan kadang berhenti dikarenakan dana yang pada tahap pertama belum mencukupi untuk pembangunan jalan, maka pihak kampung menunggu tahapan kedua atau berikut, barulah program jalanannya akan dilanjutkan lagi hingga selesai.</p>

4	Rt	1 orang	Pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah kampung sudah sesuai dengan hasil usulan semua masyarakat yang sebelumnya telah melakukan Musyawarah di tingkat kampung disampaikan oleh Kepala kampung pada Musrenbang kampung. Seperti pembangunan penimbunan jalan, Pengecoran jalan drainase dll. Semua dibangun sesuai dengan harapan masyarakat karena dikerjakan berdasarkan hasil musyawarah Kampung
---	----	---------	--

### 3.1.5 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Ridwan ( 2010: 51 ) teknik pengumpulan data adalah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Sedangkan menurut Suharsimi Arikunto ( 2000: 134 ), teknik pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya.

Adapun teknik pengumpulan data menurut buku tulisan

Dr. H. Salim, M.Pd. dkk. Yaitu :

1. Pengamatan dengan mendengar dan melihat gejala yang diteliti disebut observasi. Metode pengumpulan data ini dapat membantu peneliti menemukan gejala yang diteliti.
2. Semua informasi yang telah diperoleh dapat divalidasi melalui wawancara. Penelitian kualitatif menggunakan wawancara. Ini adalah proses mendapatkan informasi melalui tanya jawab dan tatap muka secara langsung.
3. Dokumentasi dibagi menjadi dua kategori: dokumentasi resmi terdiri dari memo, pengumuman, aturan lembaga, surat resmi, dan laporan rapat. Dokumentasi pribadi terdiri dari catatan atau tulisan yang dibuat oleh individu.

#### **1.1.6 Teknik Analisis Data**

Analisis data yang peneliti gunakan dalam penelitian kualitatif. Di lakukan saat pengumpulan data berlangsung saat dilapangan. Dan setelah pengumpulan data. Pada saat wawancara peneliti sudah menganalisis terhadap jawaban yang di wawancarai. Berikut analisis data yang digunakan oleh peneliti: <sup>1</sup> *Anniké Wulan JOM FEB. 2018 "Analisis Pengalokasian Dana Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur Desa Di Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak"*.

##### **1. Reduksi**

Proses ini berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung. Bahkan sebelum data benar-benar terkumpul sebagaimana terlihat dari kerangka konseptual penelitian. Permasalahan studi, dan pendekatan pengumpulan data yang dipilih peneliti. Reduksi data meliputi : meringkas data, mengkode, menelusuri tema, membuat gugus-gugusnya. Caranya: Seleksi ketat data, ringkasan atau uraian singkat, dan reduksi data saling berinteraksi dengan melalui konklusi dan

penyajian data, ia tidak bersifat sekali jadi, tapi secara bolak bali, pengembangannya bersifat sekuensial dan interaktif. ( rijali, 2019 ).

## **2. Penyajian Data**

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data kualitatif dapat berupa teks naratif berbentuk catatan lapangan, matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Bentuk-bentuk ini menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang dipandu dan mudah diraih, sehingga memudahkan untuk melihat apa yang sedang terjadi, apakah kesimpulan sudah tepat atau sebaliknya melakukan analisis kembali ( rijali, 2019 ). Setelah pemilihan dan pengumpulan data peneliti akan menyajikan data dalam bentuk teks didukung dengan beberapa bagan dan gambar sebagai penguat hasil mendapatkan data tersebut karena peneliti menggunakan data kualitatif yang dimana data tersebut dapat diperoleh dan disajikan dalam bentuk teks bukannya dalam bentuk angka.

## **3. Penarikan Kesimpulan**

Langkah selanjutnya dalam penelitian kualitatif menurut miles dan huberman adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi, sejak pengumpulan data, peneliti berusaha mencari makna atau arti dari symbol-simbol, mencatat, keteraturan pola, penjelasan-penjelasan, dan alur sebab akibat yang terjadi, dari kegiatan ini di buat simpulan-simpulan yang sifatnya masih terbuka, umum, kemudian menuju ke spesifik atau rinci, kesimpulan diharapkan dapat diperoleh setelah pengumpulan data selesai. ( Agesty, 2022). Setelah peneliti memilih mengumpulkan dan mengkaji data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi, peneliti menarik kesimpulan yang lebih spesifik sehingga pertanyaan peneliti dapat terjawab dengan mudah.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Kampung Warmon Kokoda adalah bagian penting dari Distrik Mayamuk, yang terletak di Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Berdasarkan lokasinya, Kampung Warmon Kokoda adalah salah satu daerah di Kabupaten Sorong yang paling dekat dengan laut, tepatnya di ujung kepala kasuari. Tidak ada musim, jadi cuaca bisa hujan atau panas kapan saja. Masyarakat Kampung Warmon Kokoda saat ini tinggal di lahan seluas 2 (dua) Hektar, tetapi wilayah sebenarnya seluas 6 Hektar. Wilayahnya berbatasan dengan distrik berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kampung Klalin
2. Sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Arar
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Distrik Mariyai, dan
4. Sebelah Selatan berbatasan dengan Distrik Makbusun.

Pada tahun 2002 menjadi awal dimana masyarakat Warmon Kokoda menempati wilayah yang saat ini menjadi tempat hidup bagi kelompok masyarakat tersebut. Sebelum terbentuk menjadi Kampung, secara administratif Kampung Warmon Kokoda dahulunya masuk dalam wilayah Kelurahan Makbusun yang berdampingan langsung dengan masyarakat transmigran Jawa dalam satu kelurahan. Kemudian pada akhir tahun 2015, dengan pendampingan MPM (Majelis Pemberdayaan Masyarakat) Muhammadiyah Warmon Kokoda resmi menjadi entitas yang berdiri sendiri sebagai suatu Kampung yang diakui dan disahkan oleh negara.

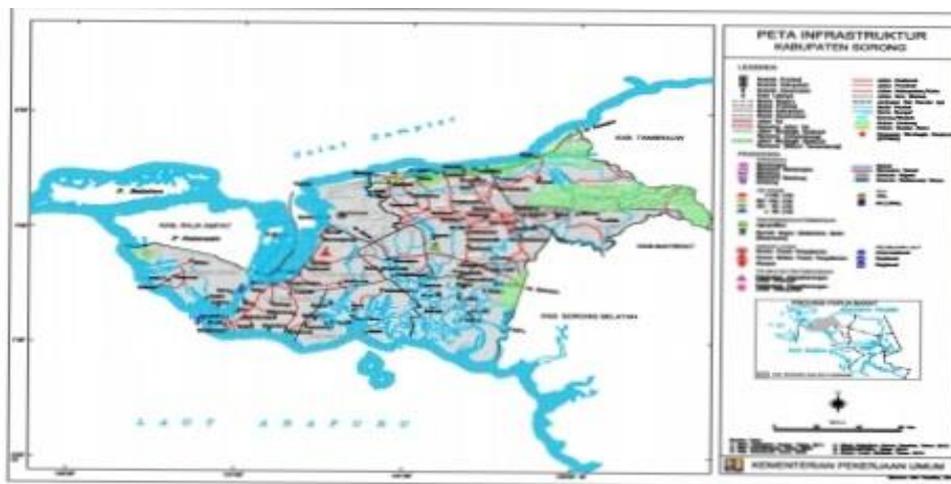
#### **4.1.1 Letak Dan Kondisi Geografis**

Kampung Warmon Kokoda memiliki luas wilayah sebesar 2 (dua) Hektar yang di tempati masyarakat Kampung Warmon Kokoda saat ini,

namun luas wilayah Kampung Warmon Kokoda sebesar 6 Hektar dan memiliki batas- batas wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kampung Klalin
2. Sebelah Barat berbatasan dengan Kampunh Arar
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Distrik Mariyai, dan
4. Sebelah Selatan berbatasan dengan Distrik Makbusun.

**Gambar 2.1**



**Gambar 2.1 Peta Wilayah Kabupaten Sorong. Sumber : Website Pemda Kabupaten Sorong**

**Gambar 2.2**



Kondisi Wilayah Kampung Warmon Kokoda: Dokumentasi TIM KKN  
Mandiri MBN-Papua

#### **4.2 Hasil Penelitian**

Di Indonesia, pengelolaan dana desa dimulai pada tahun 2005 dengan PP N0.72 tahun 2005 tentang desa, yang sekarang diperkuat oleh UU No. 6 tahun 2014 tentang desa. Untuk memenuhi kebutuhan kampung, penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat, aturan ini mewajibkan pemerintah kampung untuk menggunakan dana desa sehingga mencapai pemerataan kemampuan keuangan kampung. Ini dialokasikan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat di Kampung Warmon Kokoda agar dapat berkembang secara merata dan terarah sesuai dengan perencanaan program pemerintah yang sesuai dengan aturan.<sup>1</sup> *Sri Sapitri , Rinto Alexandro. September 2021 “Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat”*

Sesuai data yang didapatkan oleh peneliti di lapangan terkait pengelolaan dana desa dalam meningkatkan pembangunan kampung, sudah berjalan dengan baik, sebagai mana yang disampaikan oleh kepala kampung warmon kokoda bahwa sebelum pencairan dana desa dari tahap pertama sampai dengan tahap ketiga,

kepala kampung selalu melakukan musyawarah kampung yang mana musyawarah tersebut melibatkan masyarakat kampung, dari tahap perencanaan program kampung hingga pelaksanaan. Tujuannya agar aparat kampung dan masyarakat tetap berjalan bersama demi kemajuan kampung tercintanya. Kampung warmon kokoda.

Masyarakat pun sangat antusias dan senang dengan pekerjaan aparat kampung yang selalu melibatkan masyarakat. Karena dengan dilibatkannya masyarakat dalam perencanaan hingga pelaksanaan program kampung maka kampung tersebut akan ditata sesuai keinginan atau kemauan masyarakat kampung. dan tidak akan ada protes memprotes atas program yang telah dilaksanakan, dengan demikian aparat kampung dan masyarakat merasa kepuasan bersama.

#### **4.2.1 Tahap Perencanaan Pengelolaan Dana Desa**

Musyawarah Kampung dilakukan pada tahap perencanaan untuk menentukan program Kampung yang akan datang. Tabel partisipasi masyarakat berikut berdasarkan temuan wawancara dengan informan:

**Tabel: Tahapan Perencanaan/Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Musrenbang Di Kampung Warmon Kokoda**

Variabel	Indikator	Ukuran	Partisipasi (Orang)	Presentase %

<b>Perencanaan</b>	<b>Partisipasi Masyarakat pada Musyawarah Kampung</b>	Hadir	20	90,90
		Tidak Hadir	2	9,10
		<b>Total</b>	<b>22</b>	<b>100</b>
	<b>Informasi Jumlah Anggaran</b>	ada	22	100
		Tidak ada	-	-
		Tidak Tauh	-	-
		<b>Total</b>	<b>22</b>	<b>100</b>

Sumber: *Data Diolah 2023*

Dari tabel di atas, terlihat bahwa partisipasi masyarakat dalam mengikuti musyawarah sangat besar, ini dibuktikan dengan banyaknya informan yang mengungkapkan bahwa masyarakat berpartisipasi pada kegiatan Musrenbang kampung yaitu 75 dari 22 informan yang diwawancara sebanyak 20 orang atau 90,90% mengatakan bahwa masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan musyawarah Kampung sedangkan hanya 2 orang atau 9,10% lainnya tidak menghadiri musyawarah.

Hasil wawancara peneliti dengan seluruh informan, termasuk Bapak syamsudin namugur. Selaku kepala kampung warmon kokoda tentang keterlibatan masyarakat dalam kegiatan Musyawarah Kampung adalah sebagai berikut:

*“Semua masyarakat diwajibkan untuk mengikuti proses musyawarah kampung agar aspirasi dan usulan rencana kerja dalam perencanaan pembangunan di kampung warmon dapat disampaikan dalam musyawarah tersebut, dan hasil*

*musyawarah tersebut akan di reteng agar usulan atau program apa yang sangat dibutuhkan atau perlu dilaksanakan” (wawancara kepala kampung 22 juni 2024).*

Sama halnya yang di sampaikan oleh bapak Samir kuya sebagai masyarakat kampung warmon kokoda bahwa,

*”Partisipasi masyarakat dalam perencanaan program kampung selalu aktif dan ikut dalam tahapan perencanaan program-program kampung yang mana masyarakat megajukan usulan terkait program yang bisa dilaksanakan sesuai anggaran yang di dapatkan oleh pemerintah kampung, usulan-usulan tersebut akan di pertimbangkan dan di putuskan oleh pemerintah kampung, program mana yang akan di kerjakan sesuai dengan anggaran yang didapatkan kampung warmong kokoda” ( 26 juni 2024 ).*

Pernyataan yang disampaikan masyarakat Kampung Warmon Kokoda oleh bapak ragam, anggota masyarakat, menyatakan:

*“Kami masyarakat kampung selalu mengikuti kegiatan musyawarah kampung ( Muskam ) karena tidak bisa hanya menyerahkan seluruhnya kepada Kepala Kampung, kita juga harus mengusulkan program pembangunan untuk kampung kita tercinta ini dan pemerintah pun selalu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan usulan terkait pembangunan kampung warmon kokoda. ” ( wawancara masyarakat 26 juni 2024 )*

#### **4.2.2 Tahap Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa**

Proses melakukan sesuatu yang telah direncanakan sebelumnya disebut tahapan pelaksanaan. Untuk pelaksanaan pengelolaan dana desa dalam pembangunan kampung: berikut adalah tabel informasi dari informan:

**Tabel 4.6: Tahapan Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa**

<b>Variabel</b>	<b>Indikator</b>	<b>Ukuran</b>	<b>Partisipasi (Orang)</b>	<b>Presentase %</b>

<b>Pelaksanaan</b>	<b>Keterlibatan masyarakat</b>	Terlibat		
		Tidak Terlibat		
		<b>Total</b>	<b>22</b>	<b>100</b>
	<b>Pembangunan Sesuai Hasil Musyawarah</b>	Ada	22	100
		Tidak Ada	-	-
		Tidak Tauh	-	-
		<b>Total</b>	<b>22</b>	<b>100</b>

Tabel di atas menunjukkan keterlibatan masyarakat yang tinggi dalam pelaksanaan pembangunan Kampung. dari 22 informan yang diwawancarai, atau seratus persen dari mereka, mengatakan bahwa masyarakat sangat terlibat dalam pelaksanaan pembangunan kampung. Ini sebanding dengan pernyataan yang disampaikan oleh bapak Kepala Kampung Warmon Kokoda yang menyatakan bahwa:

*“Di kampung Warmon Kokoda kami, alhamdulillah, masyarakat sangat peduli dengan pembangunan, kami telah membuat drainase dan penimbunan jalan, pengocoran jalan yang dikerjakan oleh lapisan masyarakat kampung warmon kokoda setelah dilakukan musyawarah terlebih dahulu dengan masyarakat Kampung Warmon. (wawancara kepala kampung 22 juni 2024)”*

Pernyataan yang di sampaikan oleh ketua bamuskam. Bapak harsat namugur.  
*Masyarakat kampung warmon kokoda selalu mengikuti musyawara kampung. Dan masyarakat di beri kesempatan untuk menyampaikan aspirasi atau pendapat mereka terkait pembangunan kampung.*

Dilanjutkan lagi oleh Bapak Jalil Namugur selaku Ketua RT 01 Kampung Warmon Kokoda bahwa.

*“Pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah kampung sudah sesuai dengan hasil usulan semua masyarakat yang sebelumnya telah melakukan Musyawarah di tingkat kampung disampaikan oleh Kepala kampung pada Musrenbang kampung. Seperti pembangunan penimbunan jalan, Pengecoran jalan drainase dll. Semua dibangun sesuai dengan harapan masyarakat karena dikerjakan berdasarkan hasil musyawarah Kampung.”(wawancara rt 01, 26 juni 2024 )*

Tanggapan salah satu masyarakat menyampaikan bahwa.

*“dalam tahap pelaksanaan kami masyarakat selalu diutamakan untuk proses pelaksanaan program kerja, yang mana siap di laksanakan di kampung warmon kokoda, tujuannya agar anggaran yang di keluarkan atau di pake buat pekerja bisa di dapatkan atau di nikmati oleh masyarakat kampung warmon sendiri”.*

### **4.3 Pembahasan**

#### **4.3.1 hasil konseptual**

##### **4.3.1 Optimalisasi**

Pembangunan ialah salah satu cara untuk mengikuti perkembangan zaman. Dengan adanya pembangunan berarti ada yang sedang direncanakan. Pembangunan juga sebagai perencanaan untuk perubahan dan pertumbuhan suatu tempat. Menurut siagian pembangunan merupakan sebuah rencana suatu bangsa untuk merubah dan menumbuhkan pemerintahan yang modernitas untuk membina bangsa, Pembangunan itu sendiri memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sebagaimana yang telah di lakukan di kampung warmon kokoda ialah membangun jembatan, pegecoran dan pemberian dana ke beberapa bidang seperti. Bidang pemberdayaan masyarakat Rp. 204. 274. 450. Dan Bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak desa sebesar Rp. 93. 600. Agar dapat membantu dan mensejahterahkan masyarakat.

Proses merupakan suatu tahapan-tahapan yang diterapkan dari suatu pekerjaan sehingga hasil yang dicapai dari pekerjaan tersebut mampu menggambarkan baiknya prosedur yang digunakan. Dalam melaksanakan suatu pekerjaan perlu adanya proses yang tepat agar setiap pekerjaan dapat

diselesaikan secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan-tujuan yang ditetapkan.

Tahap proses ini sebagaimana telah di laksanakan di Kampung Warmon Kokoda dari Tahap Perencanaan hingga Pelaksanaan selalu melakukan musyawarah Kampung dan Pemerintah Kampung melibatkan masyarakat dalam musyawarah tersebut dan menerima saran dan masukan terkait pembangunan kampung sehingga semua akan berjalan dengan efektif dan efisien.

Optimalisasi adalah suatu proses, melaksanakan program yang telah direncanakan dengan terencana guna mencapai tujuan/target sehingga dapat meningkatkan kinerja secara optimal.

*“Semua masyarakat diwajibkan untuk mengikuti proses musyawarah kampung agar aspirasi dan usulan rencana kerja dalam perencanaan pembangunan di kampung warmon dapat disampaikan dalam musyawarah tersebut, dan hasil musyawarah tersebut akan di reting agar usulan atau program apa yang sangat dibutuhkan atau perlu dilaksanakan” (Wawancara kepala kampung)*

Pengambilan keputusan dalam peningkatan suatu pembangunan sangatlah penting sehingga berdampak positif bagi kampung tersebut.

Kampung warmon kokoda sendiri telah melakukan hal tersebut, yang mana, setiap mengambil keputusn terkait program-program yang siap di laksanakan selalu mempertimbangkan semua saran dan masukan dari masyarakat dan di reting mana yang sangat perlu di lakukan maka yang dianggap perlu sekali itulah siap di laksanakan.

Pemerintah kampung telah melakukan beberapa tindakan untuk mengoptimalkan pembangunan kampung.

Sala satu tindakan-tindakan yang telah di lakukan oleh kampung warmon kokoda adalah melakukan tahap perencanaan dan tahap pelaksanaan sehingga tahap demi tahap berjalan baik dan efisien karena selalu melibatkan masyarakat didalamnya.

*“Dari pembahasan di atas maka peneliti dapat menganalisis bahwa dari tahap perencanaan hingga tahap pelaksanaan dan pengambilan keputusan telah berjalan maksimal karena tahap demi tahap pemerintah kampung dan masyarakat selalu bekerja sama sehingga program-program dapat di bilang berjalan optimal atau baik”.*

### **3.3.2 Alokasi Dana Desa**

Salah satu aspek tata pemerintahan yang baik (Good Governance) adalah akuntabilitas, yang merupakan komponen utama dari tata pemerintahan yang baik dalam menjalankan pemerintahan desa tersebut. Akuntabilitas dapat didefinisikan sebagai tanggung jawab untuk melaksanakan misi organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui penggunaan media pertanggungjawaban yang dilakukan secara teratur. Oleh karena itu, untuk memastikan bahwa penerapan otonomi desa berjalan dengan baik, akuntabilitas pemerintahan sangat penting (Aprisiami Putriyanti, 2012).

Keterbukaan sangatlah penting. Kampung warmon kokoda telah melakukannya, di mana anggaran yang disalurkan kepada kampung warmon kokoda melalui pemerintah kampung, selalu adanya keterbukaan terhadap masyarakat kampung sehingga masyarakat pun mengetahuinya dan dapat terimah program-program yang di lakukan sesuai kemampuan anggaran yang didapatkan oleh kampung tersebut.

Rencana pembangunan dibuat oleh pemerintah kampung untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.

Sebagai pertanggungjawaban pemerintah kampung. Sebagaimana yang telah di jelaskan di atas. Pemerintah kampung telah menyalurkan sebagian anggaran ADD Kampung Warmon Kokoda tahun 2023 ke masing-masing bidang demi memenuhi kebutuhan masyarakat seperti. Bidang pemberdayaan masyarakat sebesar Rp. 204.274.450.

Keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan kampung sangat penting untuk memastikan keberhasilan dan keberlanjutan pembangunan tersebut.

*“Di kampung Warmon Kokoda kami, alhamdulillah, masyarakat sangat peduli dengan pembangunan, kami telah membuat drainase dan penimbunan jalan, pengocoran jalan yang dikerjakan oleh lapisan masyarakat kampung warmon kokoda setelah dilakukan musyawarah terlebih dahulu dengan masyarakat Kampung Warmon. ( wawancara kepala kampung 22 juni 2024 )”*

Untuk menjaga ketertiban, kelancaran, dan pencapaian tujuan bersama, disiplin sesuai dengan peraturan yang diterapkan mengacu pada kepatuhan individu terhadap aturan atau norma yang telah ditetapkan dalam suatu organisasi, lembaga, atau lingkungan tertentu.

*Kedisiplinan dalam mengatur dan menata anggaran ADD sangat perlu, karna ketidak hati-hatian dalam menata anggaran maka beresiko besar, seperti tidak dapat di percayahi ooleh masyarakat sebagai pemerintah atau ( kepala kampung ) dan dapat di berhentikan oleh masyarakat karena tidak menata anggaran dengan baik.*

Alokasi Desa (ADD) adalah salah satu jenis dana yang diberikan kepada pemerintah desa oleh pemerintah pusat untuk meningkatkan pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat. Namun, apakah pengelolaan ADD telah berjalan sesuai dengan harapan masyarakat dapat berbeda tergantung pada berbagai faktor, seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan efektivitas penggunaan dana.

Secara keseluruhan, pengelolaan dana ADD telah menunjukkan beberapa keberhasilan, tetapi juga ada beberapa masalah yang harus diselesaikan. Perbaikan transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan pengawasan yang lebih ketat diperlukan agar pengelolaan dana ADD lebih sesuai dengan harapan masyarakat. Keberhasilan kerja sama antara pemerintah desa, masyarakat, dan pihak terkait lainnya sangat penting untuk pengelolaan dana ini.

*“Dari penjelasan diatas peneliti dapat menganalisis bahwa dari segi pengelolaan dana desa demi meningkatkan pembangunan kampung warmon kokoda telah berjalan dengan baik dari keterbukaan pemerintahan hingga partisipasi masyarakat sehingga dapat berkolaborasi demi mencapai tujuan yang efektif dan efisien”.*

#### **4.3.3 Peningkatan Pembangunan Kampung**

Untuk meningkatkan kualitas ekonomi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, perlu digunakan pendekatan yang menyeluruh dan berkelanjutan yang mempertimbangkan kebutuhan, potensi, dan partisipasi aktif masyarakat. Jika pengelolaan ekonomi dilakukan dengan benar, termasuk pemberdayaan, akses ke sumber daya, dan kebijakan pemerintah yang mendukung, kualitas ekonomi masyarakat dapat meningkat secara substansial dan sesuai dengan harapan.

*Pendekatan secara menyeluruh dalam meningkatkan dan mempertimbangkan potensi dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa berjalan dengan baik dimana partisipasi antar masyarakat dan pemerintah berjalan dengan optimal.*

Ekonomi yang baik tidak hanya memperhatikan angka seperti pertumbuhan ekonomi, tetapi juga kesejahteraan individu dan masyarakat secara keseluruhan. Peningkatan kualitas hidup, pengurangan ketidaksetaraan, dan tercapainya tujuan pembangunan sosial dan ekonomi dapat dicapai melalui ekonomi yang sehat dan inklusif. Oleh karena itu, satu langkah penting menuju kesejahteraan yang berkelanjutan adalah menjamin bahwa ekonomi berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Ekonomi sangatlah berguna dan perlu bagi masyarakat dimana dengan adanya ekonomi yang memadai dapat membantuh masyarakat dalam pengurangan ketidatmampuannya.

Membangun infrastruktur yang mendukung kelestarian alam adalah salah satu cara untuk memanfaatkan dana kampung untuk pemeliharaan lingkungan. Berikut adalah beberapa contoh:

Sistem pengelolaan sampah: Bangun fasilitas pengelolaan sampah yang

baik, seperti tempat sampah terpisah untuk sampah organik dan non-organik serta tempat pembuangan akhir sampah yang ramah lingkungan.

Pembangunan sanitasi dan air bersih: Bangun sistem sanitasi yang memadai, seperti jamban sehat dan fasilitas air bersih, dapat mengurangi polusi lingkungan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Pengelolaan drainase yang efisien: Untuk mencegah banjir dan erosi tanah, bangun sistem drainase yang baik.

Jumlah dan jenis aktivitas seni budaya yang diinisiasi oleh masyarakat sangat beragam, tergantung pada tradisi, kreativitas, dan kebutuhan masyarakat setempat. Ini sangat penting untuk mempertahankan identitas budaya, memperkaya keragaman budaya lokal, dan mempererat hubungan sosial antarwarga.

*Kampung warmon sendiri mempunyai kelestarian budaya sebagaimana, anyman, noken, tikar dan kain rumput yang masyarakat manfaatkan dari tumbuhan alam sendiri*

Partisipasi masyarakat dalam seni dan budaya desa memiliki banyak keuntungan. Selain memungkinkan ekspresi kreatif, hal ini meningkatkan perasaan kolektif dan rasa bangga terhadap warisan budaya. Kegiatan seni dan budaya juga dapat meningkatkan kesejahteraan komunitas, mendorong pariwisata budaya, dan menjadi sumber penghasilan alternatif bagi warga desa.

*“Partisipasi masyarakat dalam seni lokal bagi kampung warmon kokoda sangat baik dimana adanya saling membantuh membuat kreativitas lokal sesama masyarakat demi menciptakan kemajuan seni atau budaya lokal masyarakat kokoda sendiri”.*

Dari pembahasan di atas peneliti dapat menganalisis bahwa dalam meningkatkan pembangunan kampung perlu adanya partisipasi dan kemajuan masyarakat melalui seni lokal agar dapat membantu peningkatan pembangunan kampung.

#### **3.3.4 Peran Pemeintah Kampung**

peran pemerintah sebagai komunikator mencakup tidak hanya membuat keputusan tetapi juga memastikan bahwa masyarakat memahami, menerima, dan mengikuti keputusan tersebut. Komunikasi yang efektif juga membantu proses pemerintahan menjadi lebih stabil dan harmonis.

Komunikasi memang sangatlah penting bagi masyarakat dan pemerintah, sebagaimana pemerintah kampung warmon kokoda selalu menerapkan hal tersebut dengan masyarakat agar perencanaan dan pelaksanaan program kampung berjalan dengan baik.

Pemerintah harus mengadopsi pendekatan yang menyeluruh dan berbasis pada potensi dan kebutuhan lokal untuk meningkatkan pembangunan di kampung atau desa.

Hal tersebut ini sangat penting pula dimana masyarakat dan pemerintah berkolaborasi dengan potensi masyarakat demi meningkatkan kemajuan kampung.

Ketidakpercayaan, kekurangan pemahaman, dan ketidakstabilan sosial dapat menghambat kemajuan jika komunikasi pemerintah tidak berjalan dengan baik. Oleh karena itu, untuk menjaga hubungan yang baik antara pemerintah dan masyarakat dan untuk memastikan bahwa kebijakan pemerintah diterima dan diterapkan dengan baik,

perbaikan komunikasi sangat penting. Komunikasi pemerintah dapat berjalan dengan lebih baik dan sesuai harapan melalui transparansi, keterlibatan masyarakat, pelatihan bagi pejabat publik, dan penggunaan teknologi yang tepat.

Pemerintah memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan pembangunan kampung berjalan dengan baik. Pembangunan kampung dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan perencanaan yang baik,

pemberdayaan masyarakat, pembangunan infrastruktur dasar, dan pengelolaan dana yang transparan. Pembangunan kampung akan berjalan sesuai dengan harapan, menciptakan desa yang mandiri dan sejahtera.

Untuk memastikan bahwa pembangunan kampung berjalan dengan sukses dan sesuai harapan, tingkat kerja sama antara pemerintah dan masyarakat sangat penting.

Kerja sama yang baik dapat menghasilkan sinergi, di mana pemerintah memiliki sumber daya dan kebijakan yang dibutuhkan, dan masyarakat memberikan dukungan, partisipasi, dan pemahaman lokal yang penting.

*Dari pembahasan di atas peneliti dapat menganalisis bahwa pemerintah harus lebih aktif dan bertanggungjawab dalam peningkatan pembangunan kampung agar ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah lebih baik, karena banyaknya penyalagunaan wewenang sebagai kepala kampung dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat*

### **3.3.5 Peran Masyarakat**

Tidak dapat dianggap remeh bahwa peran masyarakat dalam meningkatkan kualitas pendidikan sangat penting. Selain itu, pendidikan dapat berjalan lebih efisien dan efektif jika orang tua, komunitas lokal, dan organisasi berpartisipasi secara aktif. Untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang mendukung pendidikan yang berkualitas dan merata bagi semua anak, pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama. Semakin banyak peran masyarakat dalam dunia pendidikan, semakin besar kemungkinan anak-anak akan mendapatkan hasil pendidikan yang terbaik, yang pada gilirannya akan berkontribusi pada kemajuan sosial dan ekonomi masyarakat secara keseluruhan.

Salah satu masalah utama yang dihadapi oleh banyak negara, termasuk Indonesia, saat melaksanakan program pembangunan adalah tingginya biaya pendanaan. Biaya yang tinggi ini dapat memengaruhi efektivitas dan keberlanjutan proyek pembangunan yang direncanakan, terutama di sektor-sektor penting seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi.

Untuk peningkatan ekonomi di tingkat nasional, regional, dan lokal, pendanaan yang memadai sangat penting. Tanpa pendanaan yang cukup, upaya untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi akan gagal.

Pendanaan adalah komponen yang sangat penting dalam meningkatkan ekonomi. Jika tidak ada pendanaan yang memadai, berbagai sektor penting seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan industri tidak akan dapat berkembang. Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah untuk mengelola dana mereka dengan bijak, memperluas dana mereka, dan bekerja sama dengan masyarakat dan sektor swasta untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Upaya penting untuk mempertahankan identitas, tradisi, dan warisan budaya suatu bangsa dikenal sebagai peningkatan kebudayaan agar dapat melestarikan budaya. Budaya yang terpelihara dengan baik berfungsi sebagai fondasi sejarah dan juga berfungsi sebagai fondasi untuk kemajuan sosial, ekonomi, dan spiritual suatu masyarakat.

Budaya adalah salah satu hal yang sangat penting bagi kami sebagaimana anak budayah yang pantas untuk melestarikannya.

Untuk membuat program kampung yang berhasil dan berkelanjutan, pemerintah kampung dan masyarakat harus bekerja sama dan terbuka. Kolaborasi yang solid antara kedua pihak tidak hanya akan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, tetapi juga akan mempercepat proses pembangunan dan kemajuan kampung. Dengan kerja sama yang baik, program yang dirancang akan lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan pelaksanaannya akan lebih lancar dan berdampak positif.

*Dari pembahasan di atas peneliti dapat menganalisis, Dalam pengelolaan dana desa sangatlah penting untuk mendorong kualitas pendidikan dan kearifan lokal agar dapat Membantu dan meringankan pemerintah dan juga masyarakat dalam memajukan kampung tersebut*

#### **4.3.2 Optimalisasi Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Kampung Warmon Kokoda**

Dalam hal pengelolaan dana desa, yang diatur oleh UU No. 6 Tahun 2014, terdiri dari fase perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tahapan perencanaan pengelolaan dana desa dalam Meningkatkan pembangunan di Kampung Warmon Kokoda telah berjalan dengan

baik karena dimulai dengan musyawarah Kampung dan dilanjutkan dengan musrenbang Kampung, jadi tidak efektif jika hanya musrenbang Kampung yang dilakukan. Selain itu, tahapan perencanaan partisipasi masyarakat juga berjalan baik. Hal ini sesuai dengan Pasal 80 UU No. 6 Tahun 2014. yang berbunyi bahwa “perencanaan pembangunan desa diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa”, serta pada pasal 82 ayat 4 yang berbunyi bahwa “Pemerintah Desa wajib menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada masyarakat Kampung melalui 67 layanan informasi kepada umum dan melaporkannya dalam Musyawarah Kampung paling sedikit 1 (satu) tahun sekali”<sup>4</sup>

Penelitian Boedijono (2019) menemukan bahwa proses perencanaan dilakukan secara terbuka dan melibatkan masyarakat untuk menyerap aspirasi. Penelitian Sofiyanto, Mardani, dan Salim (2017) menemukan bahwa seluruh lapisan masyarakat dilibatkan dalam proses perencanaan di forum Musyawarah Rencana Pembangunan Kampung untuk mewujudkan pembangunan yang partisipatif dan mencapai aspirasi-aspirasi masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahap pelaksanaan pengelolaan dana desa di Kampung Warmon Kokoda, setiap pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah kampung didasarkan pada keputusan musyawarah dan dilakukan secara swakelola, dengan partisipasi masyarakat lokal. Dengan demikian, pengelolaan dana desa di Kampung Warmon Kokoda telah dijalankan dengan efektif karena sesuai dengan peraturan yang berlaku, seperti yang tercantum dalam UU No. 6 Tahun 2014, pasal 81 ayat 1 hingga 3 yang berbunyi.

1) Pembangunan Desa dilaksanakan sesuai dengan 68 Rencana Kerja Pemerintah Desa, 2) Pembangunan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Kampung dengan

---

<sup>4</sup> *Nafis Nidhomi Perubahan Sosial Masyarakat Desa Warmon Kokoda Pasca Pembentukan Desa (Studi Kasus: Desa Warmon Kokoda, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat) 2020*

Melibatkan seluruh masyarakat Kampung dengan semangat gotong royong, 3) Pelaksanaan Pembangunan Desa dilakukan dengan memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam desa”.

#### **4.3.3 Pengawasan Badan Permusyawaratan Kampung**

Salah satu lembaga kampung adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD), yang bertanggung jawab untuk mengawasi kinerja pemerintahan desa. Tiga kategori kelembagaan desa Pemerintah Kampung, Badan Permusyawaratan Kampung, dan Lembaga Kemasyarakatan bertanggung jawab atas tata kelola desa menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Junior (2021) menyatakan bahwa anggota Badan Permusyawaratan Kampung adalah perwakilan warga kampung yang dipilih melalui sistem

perwakilan daerah, yang bertugas selama enam tahun setelah bersumpah. Anggota Komite Penasihat dapat dipilih untuk tiga periode selanjutnya. Peraturan wilayah atau perkotaan harus menetapkan persyaratan tambahan yang berkaitan dengan badan pembangunan perkampungan. BPD bekerja sama dengan kepala kampung untuk membuat peraturan desa yang sesuai dengan keinginan warga. Selain itu, fungsi BPD termasuk memantau penerapan peraturan desa sekaligus memastikan kinerja pemerintah desa. Penelitian ini menggunakan teori untuk menentukan apakah fungsi pengawasan BPD terhadap kinerja kepala desa ideal atau tidak.

Adapun pengawasan yang dilakukan oleh badan permusyawaratan kampung warmon kokoda (BPK). Yang mana disampaikan oleh bapak harsat namugur selaku ketua BPK kampung warmon kokoda bahwa,

*“Kami selalu mengawasi dari tahap perencanaan hingga tahap pelaksanaan, semua berjalan sesuai harapan atau anggaran yang telah disalurkan ke berbagai program-program yang siap dilaksanakan, berjalannya tahapan-tahapan ini dengan efektif dikarenakan pihak pemerintah kampung selalu mempekerjakan masyarakat setempat. Maka dari itulah masyarakat bekerja dengan giat dan baik*

*sehingga semua tahapan berjalan dengan efektif dan efisien sesuai harapan masyarakat”.*

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Dari penelitian dan diskusi yang dilakukan mengenai “Optimalisasi Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Kampung Warmon Kokoda Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat Daya”, ditemukan bahwa pengelolaan dana desa bekerja dengan baik dalam Meningkatkan Pembangunan Kampung Warmon Kokoda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa musyawarah Kampung yang dilakukan oleh Kampung Warmon Kokoda sudah efektif pada tahap perencanaan dan pelaksanaan, karena partisipasi masyarakat yang tinggi dan transparansi anggaran pemerintah kampung kepada masyarakat. Pada tahap pelaksanaan, penelitian menunjukkan bahwa sudah efektif pada tahap ini karena penggunaan dana kampung yang sudah sesuai dengan sarannya. Sebagaimana dana yang di anggarkan oleh kampung warmon kokoda sebesar Rp. 1. 157. 810. 700. Tahun 2023

Masyarakat Kampung Warmon Kokoda sangatlah antusias dalam mengikut serta dalam musyawarah kampung, dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan hasil musyawarah tersebut. Masyarakat pun selalu siap dan dengan senang hati ikut dalam musyawarah kampung dikarenakan pemerintah kampung selalu transparan kepada masyarakat kampung terkait dana ADD yang di anggarkan setiap tahun kepada masyarakat oleh sebab itu, masyarakat dan pihak pemerintah kampung selalu berjalan bersama dengan harapan agar kampung warmon kokoda menjadi salah satu kampung termaju dan berkembang di Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat Daya.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan salah satu lembaga kampung yang memiliki fungsi untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintahan desa. Dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, bahwa didalam desa terdapat tiga kategori kelembagaan desa yang memiliki

peranan dalam tata Kelola desa, yaitu: Pemerintah kampung, Badan Permusyawaratan kampung dan Lembaga Kemasyarakatan.

## **5.2 Saran**

Mengacu kepada hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, selanjutnya peneliti akan memberikan masukan serta saran untuk memaksimalkan kinerja pemerintah Kampung Warmon Kokoda. Maka peneliti mengajukan saran/rekomendasi sebagai berikut:

1. Sebaiknya pemerintah meningkatkan lagi program sosialisasi terkait kegiatan di Kampung supaya masyarakat lebih ikut aktif dan berkontribusi dalam mengawal proses kegiatan dana desa selanjutnya.
2. Sebaiknya masyarakat kampung diharapkan lebih peka lagi dalam kontribusi Dan pengawasan terhadap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah kampung, supayah tujuan dan fungsi dapat berjalan secara maksimal serta mampu dipertanggung jawabkan amanah yang telah diperoleh dari masyarakat kepada pemerintah kampung.
3. Penelitian ini dapat menjadi bahan acuan atau referensi bagi peneliti selanjutnya tentang pengelolaan dana desa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Annike Wulan JOM FEB. 2018 “Analisis Pengalokasian Dana Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur Desa Di Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak”. Volume 1 Edisi 1.
- Aram Palilu. 2022. “Analisis partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa dikampung iwin distrik fef kabupaten sorong” Vol.3, No. 1. Papua Barat.
- Desmon, Mahamurah. Markus, Kaunang. Sarah, Sambiran. 2017 ”Optimalisasi Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa.
- Hairil Anwar 2017 Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Desa Nusapati Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah
- Khidir Ali, Agung Saputra. 2020. “Tata Kelola Pemerintahan Desa Terhadap Peningkatan Pelayanan Publik Didesa Pematang Johar”.Vol 14, Nomor 4.
- Maijon Kinaro, 2020 Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan
- Mateus Alon Dell Vierozh Butarbutar, 2022 “Peranan Masyarakat Dalam Pembangunan Desa”
- Nafis Nidhomi Perubahan Sosial Masyarakat Desa Warmon Kokoda Pasca Pembentukan Desa (Studi Kasus: Desa Warmon Kokoda, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat) 2020
- Praysi Nataly Rattu1 Novie R. Pioh2 Stefanus Sampe3. 2022 Optimalisasi Kinerja Bidang Sosial Budaya Dan Pemerintahan Dalam Perencanaan Pembangunan (Studi Di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Minahasa) Vol.2, No. 1, 2022
- Rika Susanti 1 , Arsa 2 , Ahsan Putra Hafiz 3 , Rohana4 April 2023. Analisis Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam Di Desa Sengkati Baru Kecamatan Mersam Kabupaten Batang Hari

Sri Sapitri , Rinto Alexandro. September 2021 “Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat”

Sri Devyana. 2020 “Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa”

Steffy Adelia Tind 2015 “Peranan Pemerintah Desa Dalam Perencanaan Pembangunan”

Siti, Zuliyah. 2010 Strategi Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Menunjang Pembangunan Daerah”. Volume I No. 2.

Sugiyono, 2019. Penelitian kualitatif

## **Lampiran**

### **Draf Wawancara ( instrumen penelitian )**

Wawancara dilakukan dengan jenis wawancara terstruktur dan tak berstruktur agar pertanyaan yang diajukan kepada pihak yang terlibat dapat dijawab dengan jelas. Pemilihan subjek yang akan diwawancarai lebih difokuskan kepada orang-orang yang memiliki informasi lebih luas tentang objek penelitian. Adapun narasumber yang diwawancarai adalah sebagai berikut :

1. Kepala Kampung Warmon Kokoda Kabupaten Sorong.
2. Perwakilan staf Kampung Warmon Kokoda.
3. Masyarakat Kampung Warmon Kokoda.

Adapun pertanyaan-pertanyaan yang akan di tanyakan peneliti sebagai berikut:

#### **Kepala Kampung dan Staff Kampung Warmon Kokoda.**

1. Berapa dana Alokasi Dana Desa, yang didapatkan di Kampung Warmon Kokoda?
2. Apakah dengan adanya dana tersebut, sudah cukup untuk membangun dan meningkatkan pembangunan Kampung Warmon Kokoda?
3. Kendala apa saja yang sering terjadi dalam peningkatan pembangunan Kampung Warmon Kokoda?
4. Bagaimana pendapat saudara terkait kendala-kendala yang dialami oleh masyarakat Kampung Warmon Kokoda?
5. Bagaimana cara Pemerintah Kampung dapat menyelesaikan kendala/masalah di Kampung Warmon Kokoda terkait peningkatan pembangunan Kampung Warmon Kokoda?
6. Bagaimana upaya pengawasan yang sudah di lakukan oleh Badan Permusyawaratan Kampung Warmon Kokoda Atas pengoptimalisasian penggunaan Alokasi Dana Desa oleh Pemerintah Kampung Warmon Kokoda Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat Daya?

**Masyarakat.**

1. Apakah dengan adanya Alokasi Dana Desa di Kampung Warmon Kokoda dapat membantu masyarakat baik dari sisi ekonomi, kesehatan maupun pendidikan?
2. Apakah setiap pembuatan/pembentukan program-program kampung, masyarakat dilibatkan oleh Pemerintah Kampung?
3. Bagaimana tanggapan masyarakat terkait Pelaksanaan program-program Kampung Warmon Kokoda, apakah telah berjalan baik atau ada kendala yang didapatkan?
4. Apakah masyarakat selalu dilibatkan dalam bentuk musyawarah terkait peningkatan pembangunan Kampung Warmon Kokoda?
5. Bagaimana pengoptimalisasian pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kampung Warmon Kokoda?

## LAMPIRAN



Gambar: Wawancara Kepala Kampung Warmon Kokoda



Gambar: Musyawarah Kampung Warmon Kokoda 2022/2023



Gambar: Wawancara masyarakat Kampung Warmon Kokoda ( 26 Juni 2024 )



Gambar: Wawancara ketua Bamuskam Kampung Warmon Kokoda ( 26 Juni 2024)



Gambar: Wawancara Ketua Rt 01 Kampung Warmon Kokoda ( 26 Juni 2024 )

**PENJABARAN PERUBAHAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
KAMPUNG WARMON KOKODA DISTRIK MAYAMUK  
TAHUN ANGGARAN 2023**



**ARI SYAMSUDIN RAMBEQUL, S.H.**  
Kepala Kampung, Warmon Kokoda

**PENDAPATAN TRANSFER**  
**Rp. 1.157.810.700**

**DANA DESA [ APBN ] Rp. 822.125.000**

**ADD [ APBD ] Rp. 335.685.700**



**BELANJA**

**1. BIDANG PENEYELENGGAAN PEMERINTAH DESA**

**Rp. 351.273.715**

KEGIATAN	KELUARAN	ANGGARAN	SUMBER DANA
1. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	12 OB	Rp. 30.000.000	ADD
2. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	60 OB	Rp. 125.400.000	ADD
3. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	1 PAKET	Rp. 5.100.000	ADD
4. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPD dan PPK)	1 PAKET	Rp. 7.200.000	ADD
5. Penyediaan Tunjangan SPD	60 OB	Rp. 60.000.000	ADD
6. Penyediaan Insentif / Operasional RT/RW	84 OB	Rp. 42.000.000	ADD
7. Lain-lain Sub Bidang Sifat dan Operasional Pemerintah Desa	1 PAKET	Rp. 28.800.000	ADD
8. Pemeliharaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/ Pemerintahan	1 PAKET	Rp. 16.000.000	ADD
9. Pemeliharaan Gedung/ Prasarana Kantor Desa	1 PAKET	Rp. 6.000.000	ADD
10. Penyusunan, Pendataan dan Pemutakhiran Profil Desa **)	1 PAKET	Rp. 5.000.000	DDS
11. Lain-lain Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Cakil, Statistik	1 PAKET	Rp. 25.773.715	DDS

**2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA**

**Rp. 508.662.535**

KEGIATAN	KELUARAN	ANGGARAN	SUMBER DANA
1. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa	1 PAKET	Rp. 42.000.000	DDS
2. Pemeliharaan Sarana Prasarana Perpustakaan/ Taman Bacaan/ Sanggar Budaya	1 PAKET	Rp. 90.000.000	DDS
3. Penyelenggaraan Pesyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumi, Lansia, Insentif)	1 PAKET	Rp. 47.800.000	DDS
4. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga)	1 PAKET	Rp. 29.000.000	DDS
5. Pemeliharaan Jalan Desa	1 PAKET	Rp. 242.845.000	DDS
6. Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/ Gang	100 METER	Rp. 66.017.535	DDS

**3. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

**Rp. 204.274.450**

KEGIATAN	KELUARAN	ANGGARAN	SUMBER DANA
1. Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	1 PAKET	Rp. 164.425.000	DDS
2. Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	1 PAKET	Rp. 15.185.700	ADD
3. Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	1 PAKET	Rp. 24.663.750	DDS

**4. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA**

**Rp. 93.600.000**

KEGIATAN	KELUARAN	ANGGARAN	SUMBER DANA
1. Penanganan Keadaan Mendesak	1 PAKET	Rp. 93.600.000	DDS

**TOTAL BELANJA**

**Rp. 1.157.810.700**

